



PEMERINTAH KOTA DUMAI

# INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (I-LPPD) KOTA DUMAI TAHUN 2017



Drs. H. ZULKIFLI AS, M.Si



EKO SUHARJO, SE





PEMKO DUMAI

## Kata Pengantar

**P**uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**S**esuai dengan amanah Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah setiap tahunnya dalam bentuk LPPD. Dalam memenuhi amanah tersebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Dumai Tahun 2017 disusun dan disampaikan kepada Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

**T**entunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dan menjadi harapan bagi kita semua bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amin.

Dumai,                      Maret 2018

**WALIKOTA DUMAI**

**H. ZULKIFLI AS**



PEMKO DUMAI

## **D**AFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	2
1. Kondisi Geografis	2
2. Gambaran Umum Demografis	2
3. Kondisi Ekonomi	3
a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (3 Tahun terakhir)	3
b. Potensi Unggulan Daerah	5
<b>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)</b>	<b>8</b>
A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Dumai	8
B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah	12
1. Strategi Pembangunan Daerah	12
2. Arah Kebijakan Daerah	12
C. Prioritas Daerah	21
<b>BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>23</b>
A. Urusan Konkuren	23
1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib	25
2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan	28
3. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	29
4. Organisasi Perangkat Daerah	30
B. Ringkasan Urusan Wajib	31
1. Bidang Pendidikan	33
1.1 Program dan Kegiatan	33
2. Bidang Kesehatan	35
2.1 Program dan Kegiatan	35
Rumah Sakit Umum Daerah	37
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38
3.1 Program dan Kegiatan	38
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40
4.1 Program dan Kegiatan	40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40
5. Bidang Trantib Umum dan Linmas	40
5.1 Program dan Kegiatan	40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41
Satuan Polisi Pamong Praja	41
6. Bidang Sosial	42
6.1 Program dan Kegiatan	42
7. Bidang Tenaga Kerja	43
7.1 Program dan Kegiatan	43
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44
8.1 Program dan Kegiatan	44
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44



PEMKO DUMAI

9. Bidang Pertanahan	45
9.1 Program dan Kegiatan	45
10. Bidang Lingkungan Hidup	45
10.1 Program dan Kegiatan	45
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46
11. Bidang Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	46
11.1 Program dan Kegiatan	46
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	47
12.1 Program dan Kegiatan	47
13. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47
13.1 Program dan Kegiatan	47
14. Bidang Perhubungan	47
14.1 Program dan Kegiatan	47
15. Bidang Komunikasi dan Informatika	48
15.1 Program dan Kegiatan	48
16. Bidang Koperasi dan UKM	49
16.1 Program dan Kegiatan	49
17. Bidang Penanaman Modal	49
17.1 Program dan Kegiatan	49
18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50
18.1 Program dan Kegiatan	50
19. Bidang Kebudayaan	50
19.1 Program dan Kegiatan	50
20. Bidang Perpustakaan	50
20.1 Program dan Kegiatan	50
21. Bidang Kearsipan	51
21.1 Program dan Kegiatan	51
C. Ringkasan Urusan Pilihan	51
1. Bidang Perikanan dan Kelautan;	51
1.1 Program dan Kegiatan	51
2. Bidang Pertanian ;	52
2.1 Program dan Kegiatan	52
3. Bidang Energy dan SDM	53
3.1 Program dan Kegiatan	53
4. Bidang Pariwisata ;	53
4.1 Program dan Kegiatan	53
5. Bidang Industri ;	53
5.1 Program dan Kegiatan	53
6. Bidang Perdagangan	54
6.1 Program dan Kegiatan	54
7. Bidang Ketrasmigrasian.	54
D. <b>Ringkasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	55
1. Administrasi Pemerintahan	55
1.1 Program dan Kegiatan	55
1.2 Sekretariat DPRD	59
1.2.1 Program dan Kegiatan	59
1.3 Kecamatan Dumai Kota	60
1.3.1 Program dan Kegiatan	60
1.4 Kecamatan Dumai Selatan	61
1.4.1 Program dan Kegiatan	61
1.5 Kecamatan Bukit Kapur	61
1.5.1 Program dan Kegiatan	61
1.6 Kecamatan Dumai Barat	62



PEMKO DUMAI

1.6.1	Program dan Kegiatan	62
1.7	Kecamatan Dumai Timur	62
1.7.1	Program dan Kegiatan	62
1.8	Kecamatan Medang Kampai	63
1.8.1	Program dan Kegiatan	63
1.9	Kecamatan Sungai Sembilan	64
1.9.1	Program dan Kegiatan	64
1.10	Hukum	64
1.10.1	Program dan Kegiatan	64
2.	Pengawasan	65
2.1	Inspektorat	65
2.1.1	Program dan Kegiatan	65
3.	Perencanaan	66
3.1	Bappeda	66
3.1.1	Program dan Kegiatan	66
4.	Keuangan	67
4.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67
4.1.1	Program dan Kegiatan	67
4.2	Badan Pendapatan Daerah	68
4.2.1	Program dan Kegiatan	68
5.	Kepegawaian	69
5.1	Program dan Kegiatan	69
E	Indicator Kinerja Kunci	70
<b>BAB IV</b>	<b>REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017</b>	<b>71</b>
<b>BAB V</b>	<b>TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>75</b>
A	Tugas Pembantuan Yang Diterima	75
1.	Dasar Hukum	75
2.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	75
3.	Program dan Kegiatan	76
B	Tugas Pembantuan Yang Diberikan	76
<b>BAB VI</b>	<b>TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	<b>77</b>
A	Kerjasama Antar Daerah	77
	Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	
B	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	80
	Mitra yang diajak kerjasama	80
	Dasar Hukum	80
	Bidang Kerjasama	82
	Nama Kegiatan	84
	Jangka Waktu Kerjasama	87
C	Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	
1.	Forum Koordinasi	88
2.	Materi Koordinasi	89
3.	Instansi Vertikal Yang Terlibat	90
4.	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	91
5.	Hasil dan Manfaat Koordinasi	91
6.	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	92
7.	Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	92
D	Pembinaan Batas Wilayah	92
1.	Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan Kota	99
2.	Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian	99



PEMKO DUMAI

E	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	101
	1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya	101
	2. Status Bencana	101
	3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	101
	4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana	102
	5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi	102
F	Pengelolaan Kawasan Khusus	102
G	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	103
	1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik yang Berbasis SARA, Anarkis, Sapatisme, atau yang lainnya)	103
	2. Penanggulan dan Kendalanya	103
	3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	103
<b>BAB VI</b>	<b>P E N U T U P</b>	<b>104</b>



PEMKO DUMAI

## **D**AFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Table	1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017	2
Table	2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI TANPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2014-2016	4
Table	3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2014-2016	4
Table	4 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE) TAHUN 2014-2016	5
Table	Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib	25
Table	Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan	28
Table	Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	29
Table	Organisasi Perangkat Daerah	30



PEMKO DUMAI

## *D*AFTAR LAMPIRAN

Hal

Table	1	INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM EKKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017 ASPEK PENILAIAN PADA PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PENERINTAH KOTA	
Table	2	CAPAIAN KINERJA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN	
Table	3	INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017 ASPEK TINGKAT KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN UNTUK PEMERINTAH KOTA	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

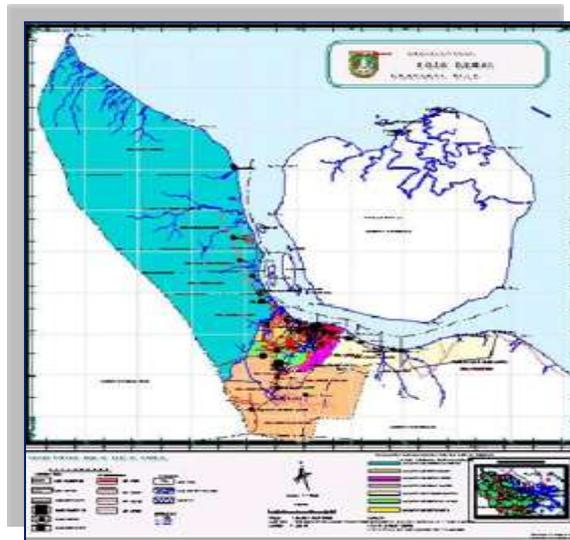
1. Undang-Undang No. 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2016–2021;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017.



PEMKO DUMAI

## B. Gambaran Umum Daerah

### 1. Kondisi Geografis



Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai..

Secara geografis, Kota Dumai berada pada posisi antara 101°23'37" - 101°8'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar **1.727,38** km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan *Selat Rupat*
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan *Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan *Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan *Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir*

### 2. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2017 berjumlah sebanyak 280.174 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 138.849 jiwa dan perempuan sebanyak 136.242 jiwa yang tergabung didalam 81.192 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 156,67 persen, yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat dikecamatan Dumai Kota yaitu 3.299,53 jiwa per-km<sup>2</sup> dan terendah di kecamatan Medang Kampai dengan kepadatan 31,75 jiwa per-km<sup>2</sup>.

Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai Tahun 2017 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

*Tabel 1*  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)			JLH KK	KEPADATAN PENDUDUK (Km <sup>2</sup> )	LAJU PERTUMBUHAN
		LK	PR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dumai Barat	19.895	19.204	39.099	11.272	851,24	43,56
2.	Dumai Timur	31.485	29.851	61.336	17.783	1.256,06	68,1
3.	Bukit Kapur	22.509	21.101	43.610	12.543	200,96	74,11
4.	Sei Sembilan	17.206	15.652	32.858	9.525	32,06	65,46
5.	Medang Kampai	6.660	6.308	12.968	3.751	31,75	27,77
6.	Dumai Kota	21.690	20.886	42.576	12.558	3.299,53	42,18
7.	Dumai Selatan	19.404	23.240	47.727	13.760	631,90	46,39
<b>Jumlah</b>		138.849	136.242	280.174	81.192	156,67	

Sumber : Disdukcapil Kota Dumai



### 3. Kondisi Ekonomi

#### a) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

##### Pendapatan Regional

##### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Bila kita lihat angka PDRB tahun 2015-2016 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tanpa minyak bumi terjadi kenaikan dari 25.430.569,61 juta rupiah tahun 2015 meningkat menjadi 27.945.396,02 juta rupiah di tahun 2016. Sedangkan angka-angka PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 20.516.493,52 juta rupiah pada tahun 2015 meningkat menjadi 21.468.403,79 juta rupiah pada tahun 2016. Yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2016 sebesar 4,64 persen.

##### 2. Pendapatan Regional Perkapita

Untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya cukup memperhatikan PDRB nya saja akan tetapi perlu juga dilihat perkembangan PDRB per kapita.

Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi oleh penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat 88,64 juta rupiah untuk tahun 2015 atau mengalami kenaikan bila dibanding dengan tahun 2014 tercatat senilai 84,23 juta rupiah, angka untuk harga konstan menunjukkan 72,49 juta rupiah untuk tahun 2014 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 70,55 juta rupiah.

Berikut ini di tampilkan data tentang PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan usaha, Indeks Berantai PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, Indeks Berantai PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan 2000 menurut lapangan usaha, dan PDRB perkapita dan Pendapatan Regional perkapita Tahun 2014-2016:



PEMKO DUMAI

**Tabel 2**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI**  
**ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TANPA MIGAS**  
**(000.000.RUPIAH) TAHUN 2014-2016)**

NO	LAPANGAN USAHA Industrial Origin	2014 )	2015 *)	2016 **)
1	2	3	4	5
A.	PERTANIAN,KEHUTANAN DAN PERIKANAN.	1,437,574.7	1,551,170.34	1,687,641.38
B.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	108,904.9	120,471.72	121,859.63
C.	INDUSTRI DAN PENGOLAHAN	12,499,495.37	13,521,271.09	15,058,108.05
D.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	11,694.09	18,026.24	24,522.43
E.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	3,653.86	4,044.55	4,293.05
F.	KONSTRUKSI	2,562,176.39	2,869,884.03	3,214,657.79
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	4,589,145.67	4,691,523.15	5,000,294.68
H.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	727,106.64	807,763.79	877,796.94
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	200,381.58	235,071.24	260,520.57
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	234,989.02	270,710.40	294,246.73
K.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	366,129.13	355,025.11	365,887.32
L.	REAL ESTAT	113,119.61	127,215.13	134,709.46
M,N.	JASA PERUSAHAAN	1,223.74	1,419.08	1,554.95
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	494,473.40	524,615.72	541,616.22
P.	JASA PENDIDIKAN	122,921.41	142,978.73	149,543.32
Q.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	37,775.23	46,880.43	49,787.22
R,S,T,U.	JASA LAINNYA	117,702.05	142,498.86	158,356.28
<b>PDRB</b>	<b>GRDP</b>	<b>23,628,466.85</b>	<b>25,430,569.61</b>	<b>27,945,396.02</b>

SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

**Tabel 3**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**(JUTAAN RUPIAH) TAHUN 2014-2016**

NO	LAPANGAN USAHA Industrial Origin	2014 )	2015 *)	2016 **)
1	2	3	4	5
A.	PERTANIAN,KEHUTANAN DAN PERIKANAN.	1,138,071.39	1,139,159.31	1,152,198.89
B.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	87,258.58	87,421.17	83,885.46
C.	INDUSTRI DAN PENGOLAHAN	11,059,234.35	11,357,155.83	12,069,822.54
D.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	13,196.96	14,483.65	17,107.96
E.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	3,428.96	3,523.70	3,517.99
F.	KONSTRUKSI	2,081,314.46	2,119,777.32	2,184,087.17
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3,771,270.34	3,776,043.56	3,887,613.26
H.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	590,801.20	602,752.39	632,138.13
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	146,744.72	150,191.31	154,066.50
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	229,294.86	245,697.40	255,850.29
K.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	285,154.19	265,536.84	265,883.62
L.	REAL ESTAT	90,248.56	94,773.07	94,113.61
M,N.	JASA PERUSAHAAN	958.60	1,032.15	1,069.38
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	421,465.77	429,988.77	430,683.13
P.	JASA PENDIDIKAN	89,917.60	94,631.35	95,277.88
Q.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	29,384.74	32,305.65	32,586.29
R,S,T,U.	JASA LAINNYA	94,630.46	102,020.06	106,501.69
<b>PDRB</b>	<b>GRDP</b>	<b>20,132,375.72</b>	<b>20,516,493.52</b>	<b>21,468,403.79</b>

SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI



**Tabel 4**  
**LAJU PERTUMUBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**(PERSENTASE) TAHUN 2014-2016**

NO	LAPANGAN USAHA Industrial Origin	2014 )	2015 *)	2016 **)
1	2	3	4	5
A.	PERTANIAN,KEHUTANAN DAN PERIKANAN.	1,62	0,10	1,14
B.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,90	0,19	4,04
C.	INDUSTRI DAN PENGOLAHAN	6,19	2,69	6,28
D.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	13,65	9,75	18,12
E.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	1,95	2,76	0,16
F.	KONSTRUKSI	4,59	1,85	3,03
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	0,95	0,13	2,95
H.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9,92	2,02	4,88
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9,20	2,35	2,58
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	11,24	7,15	4,13
K.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	39,50	6,88	0,13
L.	REAL ESTAT	3,75	5,01	1,41
M,N.	JASA PERUSAHAAN	8,50	7,67	3,61
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	0,42	2,02	0,16
P.	JASA PENDIDIKAN	8,96	5,24	0,68
Q.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	2,56	9,94	0,87
R,S,T,U.	JASA LAINNYA	11,86	7,81	4,39
<b>PDRB</b>	<b>GRDP</b>	2,69	1,19	4,64

SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

#### a) Potensi Unggulan Daerah

Secara geografis Kota Dumai terletak pada posisi yang strategis dan memiliki potensi unggulan antara lain:

- Kota Dumai berhadapan langsung dengan Selat Rupa dan Selat Malaka, berada pada jalur perhubungan laut terpadat sehingga menjadi salah satu pelabuhan Samudera yang paling strategis dan potensi untuk kegiatan ekspor dan import.
- Kota Dumai terletak ditengah-tengah intensitas jalur penghubung darat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta penghubung untuk daerah Riau Daratan, disamping itu juga sebagai penghubung laut yang berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia khususnya Malaka, Negeri Sembilan dan Singapura, maka Kota Dumai sangat layak menjadi pusat perdagangan, yang menjadi issue actual , Dumai dicanangkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone).

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut diatas Kota Dumai dalam memainkan peranannya kedepan, telah mempersiapkan antara lain ;

##### ➤ Transportasi Darat

Untuk kelancaran transportasi darat guna mendukung intensitas arus barang dan orang yang cukup tinggi, maka Pemerintah Kota Dumai telah menyiapkan Terminal Penumpang di Jalan Kelakap Tujuh seluas 7 ha dan Terminal Barang di Bukit Jin Jalan Kelurahan Bukit Datuk seluas 6 ha.



PEMKO DUMAI

➤ Transportasi Laut

Kota Dumai sebagai pintu gerbang daerah Timur Sumatera, pelabuhan yang ada tidak hanya melayani tujuan domestik, tetapi juga ke negara tetangga Malaysia dan Singapura, Untuk melayani pelayaran tersebut telah tersedia antara lain;

- Pelabuhan umum Pelindo yang sudah dikenal Internasional dengan kedalaman 11 Mtr, dapat mengakomodasi kapal dengan bobot 20-30 ribu dwt dan dapat melakukan bongkar muat barang umum sebesar 5,6 juta ton/thn dan cpo 4 juta ton/tahun serta keluar-masuk kapal 1 tahun sebanyak 2500 kapal.
- Pelabuhan Caltex/chevron untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan kedalaman 16 Mtr, dengan bobot 60-70 dwt
- Pelabuhan Pertamina untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan kedalaman kolam pelabuhan 16 Mtr, dapat mengakodasi kapal bobot 60 dwt Dari kedua pelabuhan tersebut terdapat kapal yang keluar masuk sebanyak 4.847 Kalap pertahun.
- Pelabuhan Kawasan Industri Dumai mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK dengan kedalaman kolam 14 Mtr, dapat mengakomodasi kapal 50 dwt

➤ Transportasi Udara

Untuk transportasi udara, Kota Dumai memiliki Bandar udara Pinang Kampai, yang dapat menampung pesawat Fokker 28 dan Fokker 100, dengan panjang landasan 1.800 Mtr dan lebar 30 Mtr, serta akan dikembangkan menjadi 2.250 Mtr X 45 Mtr. Pelayaran transportasi udara dilayani oleh PT. Pelita Air Service untuk rute Dumai-Jakarta PP, dan RAL, Dumai-Batam.

➤ Kawasan Industri

Kota Dumai juga memiliki lima potensi keunggulan kawasan industri yang strategis yaitu kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri Dumai Bukit Timah. Salah satu Kawasan Industri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni Kawasan Industri Pelintung. Di kawasan Industri ini telah di bangun satu dermaga ekspor dengan tiga kapal Tanker sekali standar, dan telah memulai memproduksi pupuk NPK yang diyakini telah menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara.



**PEMKO DUMAI**

Disamping itu, Kota Dumai memiliki sarana penunjang perdagangan dan sarana ekonomi Kota, yaitu pasar tradisional yang moderen yakni Pasar Pulau Payung. Dikota Dumai juga sudah dibangun pusat perbelanjaan modern yaitu Pusat Perbelanjaan Ramayana yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat domestic yang berasal dari wilayah hinterland Kota Dumai yang kaya seperti Duri, Bagan Siapi-api, Bagan Batu, Bengkalis, Bukit Batu dan Rumat untuk datang berbelanja di Kota Dumai.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016–2021, telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011. Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dijabarkan pernyataan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah serta memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Menurut Fungsinya, serta Program Pembangunan Daerah, sehingga RPJMD menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

RPJMD juga menjadi acuan resmi bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD, serta setiap SKPD menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.

#### A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Dumai

Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021.

***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Tahun 2021”***

Pernyataan Visi tersebut memiliki makna:

- 1) Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin  
Arti kata :
  - a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
  - b) Lahir :keduniaan; jasmani
  - c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)



PEMKO DUMAI

- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban
- Arti kata:
- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
  - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
  - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
  - d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai di atas, berdasarkan komitmen pembangunan jangka menengah Kota Dumai, ditetapkan Misi Pembangunan Kota Dumai sebagai berikut :

<b>Pertama</b>	<b>: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar</b>
<b>Kedua</b>	<b>: Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing</b>
<b>Ketiga</b>	<b>: Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan</b>
<b>Keempat</b>	<b>: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan</b>
<b>Kelima</b>	<b>: Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan</b>
<b>Keenam</b>	<b>: Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah</b>
<b>Ketujuh</b>	<b>: Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu</b>

#### TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan air bersih dengan sasaran:
  - a) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih



PEMKO DUMAI

- b) Terlaksananya Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Air Baku yang berkelanjutan
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata dengan sasaran
  - a) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
  - b) Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata
  - c) Meningkatnya infrastruktur perkotaan
  - d) Terwujudnya Kota Dumai yang Bersih, Indah, dan Ramah Lingkungan
  - e) Terjaganya lingkungan kawasan pesisir
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran
  - a) Meningkatnya Partisipasi PAUD
  - b) Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah
  - c) Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan
  - d) Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
4. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat
  - a) Menurunnya Mortalitas (angka kematian)
  - b) Menurunnya Morbiditas (angka kesakitan)
  - c) Meningkatnya status gizi
  - d) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan (RSUD)
5. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Sosial masyarakat
  - a) Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
  - b) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera
  - c) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
6. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan sasaran
  - a) Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat
  - b) Meningkatnya daya saing produk UMKM
7. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan sasaran Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran
  - a) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
  - b) Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai
9. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran
  - a) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - b) Meningkatnya tata kelola dokumen/ arsip penting daerah
  - c) Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
  - d) Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah



- e) Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - f) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam mendukung trifungsi DPRD
  - g) Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - h) Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah
10. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
    - b) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  11. Meningkatkan kesejahteraan/Pendapatan petani/peternak/pembudidaya ikan/nelayan dengan sasaran Meningkatnya nilai pendapatan petani/peternak/pembudidaya ikan/nelayan
  12. Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat dengan sasaran
    - a) Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan
    - b) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
  13. Meningkatkan kelestarian sumber daya hutan dengan sasaran Meningkatnya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
  14. Menjaga kesehatan masyarakat veteriner dengan sasaran Berkurangnya angka penyakit hewan menular dan zoonosis.
  15. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran
    - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah
    - b) Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai
    - c) Meningkatnya investasi di kota Dumai
  16. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan sasaran
    - a) Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal
    - b) Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif , tuntas, terkendali dan indenpenden, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan
    - c) Menigkatnya penerapan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta penerapan peraturan perundang-undangan
  17. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia berbasis nilai-nilai budaya dan agamadengan sasaran Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan



## B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

### I. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

### II. Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

**Misi Pertama: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Menuntaskan kendala-kendala terkait pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mengikutinya untuk mencapai pelayanan air bersih yang optimal
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan kabel listrik dan komunikasi
3. Mengembangkan jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat
4. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kontinuitas pelayanan
5. Menyediakan prasarana perhubungan yang memadai



**PEMKO DUMAI**

6. Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.
7. Mewujudkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang aman dan nyaman untuk mendukung arus lalu lintas barang/jasa.
8. Mengembangkan sistem drainase, bangunan pengendalian banjir, dan Pengembangan jaringan Irigasi
9. Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan pengujian
10. Meningkatkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas.
11. Mengembangkan sistem drainase dan pengendalian banjir
12. Menambah jaringan listrik dipelosok dan Membangun Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
13. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan
14. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
2. Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
3. Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
5. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
6. Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi
7. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi
8. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
10. Meningkatkan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
11. Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
12. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan air limbah domestik
13. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
14. Normalisasi sungai dan jaringan drainase
15. Meningkatkan luas daerah resapan air
16. Menyediakan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an
17. Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan
18. Meningkatkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
19. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang
20. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan



**Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Mengembangkan pendidikan PAUD
2. Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas pendidik
4. Meningkatkan kualitas lembaga/satuan pendidikan
5. Mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
6. Meningkatkan cakupan layanan perpustakaan
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif.
9. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
10. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan masyarakat secara merata
12. Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
13. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
14. Meningkatkan kenyamanan kota untuk tumbuh kembang anak
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB
16. Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua diatas adalah sebagai berikut

1. Penyediaan TK pembina untuk setiap kecamatan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP khususnya sekolah negeri dan penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
3. Memfasilitasi pendidik untuk meningkatkan kualifikasinya
4. Mengembangkan sekolah yang terakreditasi dan berstandar nasional
5. Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
6. Mengembangkan layanan perpustakaan sampai ke tingkat kelurahan.
7. Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat
8. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar
9. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan



10. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan
12. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan
13. Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dan memelihara mutu institusi pelayanan kesehatan pemerintah melalui paradigma sehat dengan promotif, preventif dan rehabilitatif.
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial
16. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif
17. Memberikan pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
18. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
19. Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah
20. Mewujudkan kota Dumai sebagai kota layak anak
21. Meningkatkan sosialisasi manfaat keluarga berencana
22. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
23. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

**Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Penguatan koperasi dalam mendukung UMKM
2. Penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM, networking, permodalan dan Daya saing produk
3. Memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketiga diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kinerja koperasi aktif sebagai sumber pendanaan UMKM
2. Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
3. Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan



PEMKO DUMAI

4. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar
5. Pemanfaatan dan pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai
6. Meningkatkan kualitas data jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral
7. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan
8. Meningkatkan akses dan bantuan usaha bagi keluarga miskin
9. Memberdayakan kelompok usaha keluarga miskin
10. Mengembangkan kegiatan usaha produktif masyarakat miskin
11. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar
12. Meningkatkan lifeskill keluarga miskin

**Misi Keempat : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
2. Meningkatkan K3 melalui penegakan peraturan daerah
3. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
4. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatus yang berkarakter melayani
5. Mewujudkan manajemen pengelolaan arsip daerah secara efektif dan efisien.
6. Meningkatkan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara elektronik
7. Menata produk hukum daerah
8. Meningkatkan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi.
9. Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
10. Mewujudkan keterpaduan data dan informasi pembangunan daerah
11. Pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
12. Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel
13. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai
14. Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
15. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa
16. Peningkatan profesionalitas, kemampuan dan keahlian petugas linmas
17. Penguatan kelompok-kelompok kerja/ tim penanganan kamtibmas dan konflik sosial
18. Membangun pos keamanan lingkungan yang sesuai standar



19. Penguatan kelompok-kelompok kerja/ tim pemantauan orang asing dan lembaga masyarakat
  20. Penguatan lembaga dan forum forum agama dan forum daerah
  21. Peningkatan peran pemerintah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air
  22. Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan partai-partai politik
- Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat diatas adalah sebagai berikut
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan public
  2. Penyelesaian tapal batas administrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai serta perbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan hilir
  3. Memantapkan pelayanan publik yang prima.
  4. Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal
  5. Meningkatkan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.
  6. Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada setiap Kecamatan
  7. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
  8. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan
  9. Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Kota Dumai
  10. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya.
  11. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya
  12. Menyediakan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah
  13. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
  14. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi manajemen kepegawaian
  15. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja
  16. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
  17. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  18. Menerapkan tata kelola arsip daerah sesuai peraturan/Undang-undang kearsipan.
  19. Peningkatan konektifitas jaringan teknologi informasi dalam layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  20. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah



PEMKO DUMAI

21. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan
22. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
23. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
24. Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable
25. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah
26. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan
27. Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan
28. Meningkatkan peran dan kualitas Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
29. Meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat

**Misi Kelima: Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Memperluas networking antar pelaku usaha agribisnis pertanian dan perikanan
2. Mensinergikan pengembangan kawasan sektor pertanian/ sektor perikanan (minapolitan) dengan pemanfaatan ruang kota untuk mengurangi land conversion
3. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan
4. Peningkatan reboisasi dan penghijauan serta perlindungan hutan
5. Mencegah dan menanggulangi penyakit hewan menular dan zoonosis.

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kelima adalah sebagai berikut

1. Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan
2. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil produksi
3. Meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman
4. Ekstensifikasi/Intensifikasi pertanian dan sektor perikanan
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan
6. Menyediakan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian
7. Memperkuat/meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet, pelayanan, pembinaan, pengawasan pangan dan suveylance penyakit zoonosis.
8. Merehabilitasi lahan kritis, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan



**Misi Keenam : Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa
2. Meningkatkan peran sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
4. Memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada investor
5. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan adil untuk meningkatkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keenam adalah sebagai berikut

1. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani pasar lokal dan regional
2. Penyediaan dan peningkatan fasilitas pergudangan
3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangan dan jasa
4. Memperluas networking pelaku usaha perdagangan dan jasa
5. Mewujudkan kerjasama dalam pengembangan kawasan industri
6. Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
7. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri
8. Penataan kawasan industri
9. Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
10. Meningkatkan daya Saing Industri Kecil dan Menengah
11. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan
12. Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
13. Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
14. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global
15. Mengintegrasikan Hubungan Harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
16. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja



**Misi Ketujuh : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan akses untuk informasi yang bernilai keagamaan dalam pembentukan karakter
2. peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
3. peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan keperbukalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian
5. Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketujuh adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur
2. Mengadakan peringatan hari-hari besar keagaamaan
3. Meningkatkan pembinaan kualitas pembangunan sosial keagamaan
4. Pengembangan seni dan tradisi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
5. Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar tradisional untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan
6. Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan budaya
7. Menyusun masterplan kepariwisataan
8. Pembenahan pusat informasi kepariwisataan dengan berbasis IT
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan
10. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
11. peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
12. Pembangunan Gedung Kepemudaan
13. Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
14. Pembangunan GOR
15. Revitalisasi sarana olahraga
16. Peningkatkan pembinaan kepada organisasi keolahragaan



PEMKO DUMAI

### C. Prioritas Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai merupakan kumpulan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 14 Dinas, 2 Sekretariat, Inspektorat, 4 badan, 5 Kantor dan 7 SKPD Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2016, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2017 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan sistem infrastruktur penyediaan air bersih dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka meningkatkan potensi dan daya saing kota, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya cakupan pelayanan jaringan air bersih
  - b. Meningkatnya kualitas air bersih
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
  - d. Meningkatnya pengelolaan penataan ruang
  - e. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
  - f. Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan
  - g. Terjaganya lingkungan kawasan pesisir
2. Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi disektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya pendapatan petani/peternak/nelayan
  - b. Meningkatnya produksi perikanan
  - c. Meningkatnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
  - d. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
  - e. Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan
  - f. Meningkatnya peran CSR dalam perekonomian
  - g. Meningkatnya daya saing produk UMKM dan IKM
  - h. Meningkatnya kegiatan perdagangan dan jasa
  - i. Berkembangnya sentra industri kreatif
  - j. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai
  - k. Menurunnya kesenjangan antar Kecamatan
  - l. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
  - m. Menurunnya jumlah penduduk miskin



PEMKO DUMAI

3. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan, dengan sasaran :
  1. Meningkatnya kualitas pendidikan
5. Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja dengan sasaran :
  1. Meningkatnya investasi di Kota Dumai
  2. Meningkatnya kerjasama antar wilayah yang berbatasan dalam aspek ekonomi
  3. Terwujudnya Dumai sebagai tempat tujuan investasi di pesisir Sumatera dan kota terakhir kunjungan potensi ekonomi, jasa dan industri, pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang lain
  4. Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan dengan sasaran :
  1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
  2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak dengan sasaran :
  1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  2. Meningkatnya pelayanan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
  3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga Kota Dumai dengan sasaran :
  1. Meningkatnya aktualisasi seni dan budaya dan peranan pemuda dan keolahragaan dalam kehidupan masyarakat



### BAB III

## URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

### A. Urusan Konkuren

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. *Urusan Wajib meliputi ;*

- Pendidikan ;
- Kesehatan ;
- Pekerjaan umum dan Penataan ruang ;
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;
- Trantib Umum dan Linmas ;
- Sosial ;
- Tenaga kerja ;
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- Pertanahan ;
- Lingkungan Hidup ;
- Administrasi Kependudukan dan catatan sipil ;
- Pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- Pengendalian Penduduk dan KB ;
- Perhubungan ;
- Komunikasi dan informatika ;
- Koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
- Penanaman modal ;
- Kepemudaan dan olah raga ;
- Kebudayaan ;
- Ketahanan pangan ;
- Statistik ;
- Persandian ;
- Kearsipan ; dan
- Perpustakaan.



PEMKO DUMAI

*Urusan Pilihan meliputi ;*

- Kelautan dan perikanan ;
- Pariwisata ;
- Pertanian ;
- Energi dan sumber daya mineral ;
- Industri ;
- Perdagangan ; dan
- Ketransmigrasian.

*Sedangkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi ;*

- Administrasi Pemerintahan ;
- Pengawasan ;
- Perencanaan ;
- Keuangan ; dan
- Kepegawaian.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keselarasan hubungan antara tingkatan dan susunan pemerintah.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan tersebut diatas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib dan urusan pilihan secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut :



PEMKO DUMAI

**1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib**

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp.juta)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp.Juta)	Persen tasi (%)	Nama SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	234.664.886.671	28.671.431.132	39.651.504.827	83.794.480.573	386.782.303.203	353.631.749.639	91,4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Kesehatan	33.448.133.040	17.537.907.850	29.000.598.984	16.170.349.641	96.156.989.515	90.491.667.382,33	94,11	1. Dinas Kesehatan
		27.641.881.580	49.282.532.000	51.169.365.590	54.716.534.902,85	182.810.314.072,85	182.810.314.072,85	99	2. RSUD
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	8.398.698.310	6.349.743.435	29.512.872.793	107.833.923.969	152.095.238.507	141.433.260.288	92,99	Dinas PU
		0	90.850.000	334.693.210	0	425.543.210	415.353.350	97,61	Bappeda
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	2.554.098.920	1.330.480.400	21.367.010.707	5.868.301.784,94	28.565.889.896,94	25.839.546.381	90,46	Dinas Perkim
		0	192.400.000	438.928.000	0	631.328.000	590.714.925	93,57	BPBD
5	Trantib Umum dan Linmas	5.318.308.260	1.466.640.000	1.640.735.975	133.440.025	8.559.124.260	8.251.843.700	96,41	Satpol PP
		3.417.650.900	346.700.000	1.170.422.000	64.500.000	4.999.272.900	4.463.940.424	89,29	BPBD
		1.097.244.480	1.956.300.000	1.597.610.200	55.000.000	4.706.154.680	3.526.540.116	74,93	Kantor Kesbangpol



PEMKO DUMAI

6	Sosial	2.344.917.060	1.402.120.000	2.723.919.336	139.547.400	6.610.503.796	5.754.079.236	87	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	2.972.993.460	702.900.000	1.857.300.000	0	5.533.193.460	4.984.082.084	90,08	Disnaker Trans
8	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	3.283.014.420	693.782.500	3.839.998.083	240.826.000	7.549.302.803	7.183.379.977	97,02	Dinas PP & PA
		0	127.400.000	380.918.200	0	508.318.200	505.770.292	99,50	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
9	Pertanahan	0	199.385.000	639.115.000	5.900.000	844.400.000	769.821.000	91	Sekretariat Daerah
10	Lingkungan Hidup	4.134.685.780	7.719.039.200	5.550.078.098	1.154.152.973	18.557.956.051	17.848.770.257	97	Dinas Lingkungan Hidup
		0	504.000.000	43.412.500	0	547.412.500	532.874.000	97,34	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
11	Administrasi Kependudukan & Capil	3.396.771.220	1.100.600.000	3.693.309.680	42.300.000	8.232.980.900	8.045.057.596	98	Dinas Duk & Capil
12	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	262.700.000	1.184.570.645	0	1.229.815.645	1.164.559.755	94,69	Sekretariat Daerah
13	Pengendalian Penduduk & KB	3.151.762.040	352.892.500	1.825.760.447	1.012.000.000	6.342.414.987	6.119.938.926	96,99	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
14	Perhubungan	10.121.729.400	6.177.007.600	8.413.513.440	3.360.010.550	28.072.260.990	26.933.465.526	95,94	Dinas Perhubungan
15	Komunikasi & Informatika	0	179.100.000	1.876.460.000	588.050.000	2.643.610.000	1.535.510.462	58,08	Sekretariat Daerah
16	Koperasi & UKM	3.716.423.920	895.480.000	1.877.552.205	132.150.000	6.621.606.125	6.239.376.474	94,23	Dinas Perindustrian, Koperasi & UKM
17	Penanaman Modal	5.554.575.240	994.750.000	2.795.660.000	1.423.840.000	10.768.825.240	10.350.698.486	96,12	Dinas PM & PTSP
18	Kepemudaan & Olahraga	3.288.151.529	640.710.000	2.458.525.418	325.768.980	6.713.155.927	6.584.547.403	98,08	Diskopar



PEMKO DUMAI

19	Kebudayaan	0	372.100.000	1.302.952.500	0	1.675.052.500	1.642.988.341	98,09	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
20	Perpustakaan	2.584.072.840	560.480.000	982.391.475	287.641.500	4.414.585.815	4.117.730.215	93,27	Dinas Perpustakaan & Kerasipan
21	Kearsipan	0	19.650.000	66.187.025	0	85.837.025	76.695.200	89,34	Dinas Perpustakaan & Kerasipan
Total Belanja Urusan Wajib Tabel ini		361.118.776.421	132.580.567.617	208.505.783.147	276.183.870.299	977.663.224.284	921.844.275.508	94,3	



PEMKO DUMAI

## 2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

No	Urusan Pilihan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp.Juta)	Perse ntasi (%)	Nama SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kelautan & Perikanan	3.405.925.860	716.810.000	2.236.896.050	0	6.359.631.910	6.095.683.724	99,32	Dinas Perikanan
2	Pariwisata	0	180.150.000	793.972.900	148.219.000	1.122.341.900	1.110.948.034	98,98	Diskopar
3	Pertanian	7.492.996.460	1.804.390.000	5.338.506.850	58.100.000	14.693.993.310	14.591.157.741	98	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
4	Perdagangan	4.514.928.300	1.545.250.000	1.841.209.781	544.765.319	8.446.153.400	8.035.751.362	95,14	Dinas Perdagangan
5	Perindustrian	0	46.450.000	507.452.425	0	553.902.425	516.880.062	93,32	Dinas Peindustriam, Koperasi & UKM
Total Belanja Urusan Pilihan		15.413.850.620	4.293.050.000	10.718.038.006	751.084.319	31.176.022.945	30.350.420.923	97,4	

Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara



PEMKO DUMAI

### 3. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Urusan Pilihan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp.Juta)	Perse ntasi (%)	Nama SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administrasi Pemerintahan	15.429.431.970	11.023.245.000	43.159.741.610	7.856.012.000	76.585.232.580	66.560.631.034	87	Sekretariat Daerah
		3.986.227.650	2.518.960.000	18.318.403.000	853.386.000	23.047.509.000	18.756.548.611	81,38	Sekretariat DPRD
		4.354.807.860	916.041.600	2.177.258.400	42.700.000	7.490.807.860	7.314.278.539	97,64	Kec. Dumai Barat
		4.875.298.120	1.340.925.000	1.956.175.000	15.900.000	8.188.298.120	7.924.168.248	96,77	Kec. Dumai Timur
		5.650.805.580	646.893.600	2.097.306.400	52.800.000	8.447.805.580	8.124.858.679	96,18	Kec. Bukit Kapur
		4.886.748.840	645.632.000	1.368.508.000	128.860.000	7.029.748.840	6.738.081.367	95,85	Kec. Medang Kampai
		5.174.423.730	926.820.000	1.945.380.000	2.800.000	8.049.423.730	7.760.131.307	96,41	Kec. Sungai Sembilan
		5.557.264.360	1.112.125.000	2.192.875.000	0	8.862.264.360	8.578.624.582	96,80	Kec. Dumai Kota
		5.145.601.180	907.495.000	2.233.630.000	87.875.000	8.374.601.180	8.046.408.303	96,08	Kec. Dumai Selatan
2	Pengawasan	5.228.213.514	611.350.000	2.890.334.000	18.000.000	8.747.897.514	7.924.317.107	90,59	Inspektorat
3	Perencanaan	3.530.454.770	1.863.300.000	4.615.639.006	487.950.000	10.497.343.776	7.334.318.798	69,8	Bappeda
4	Keuangan	17.067.758.610	2.739.750.000	5.838.338.638	465.464.400	26.111.311.648	22.956.016.140	87,92	BPKAD
		11.663.186.681,67	3.039.380.000	6.900.335.713	1.032.280.000	22.635.182.394,67	20.595.650.665	90,99	Bapenda
5	Kepegawaian	2.722.456.160	1.135.100.000	4.135.436.000	0	7.992.992.160	7.451.165.226	93,22	BKPP
Total Belanja Urusan		95.272.679.026	29.427.017.200	99.829.360.767	11.044.027.400	232.060.418.743	206.065.198.606	88,8	

Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara



PEMKO DUMAI

#### 4. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah Kota Dumai diatur dalam Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

SKPD Kota Dumai	Nama	Jumlah Personil (PNS)	Keterangan
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	Ir. H. M. NASIR, MP	143	Sekda
<u>Asisten :</u> 1. Pemerintahan & Kesra 2. Perekonomian & Pembangunan 3. Administrasi Umum	Drs. HAMDAN KAMAL SYAMSUDDIN, I, ST Drs. MUSTAFA KADIR		Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
<u>Bagian :</u> 1. Adm. Pemerintahan Umum 2. Adm. Pembangunan 3. Adm. Pertanahan 4. Adm. Perekonomian 5. Humas 6. Adm. Kesra 7. Hukum & HAM 8. Umum 9. Organisasi 10. Adm. Pemberdayaan Masyarakat 11. Keuangan dan Aset 12. Infokom	Drs. MHD. FAUZAN AFFIFUDIN SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si JUPRI RISKI KURNIAWAN T.S, ST AMIRUDDIN DEDE MIRZA, SH, M.H Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si Drs. ZAKARIA R. DONA  RESIANA, S.STP EKO WARDOYO		
Sekretariat DPRD Kota Dumai	FRIDARSON, SH	44	
Inspektorat Kota Dumai	Y. RUCKY SUBRATA, SH	45	
<u>Dinas :</u> 1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Perkim 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA 9. Dinas Pengendalian Penduduk & KB 10. Dinas Penanaman Modal & PTSP 11. Dinas Perdagangan 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Ketahanan Pangan 14. Dinas Tenaga Kerja & Trans 15. Dinas Perpustakaan & Kerasipan	Drs. H. SYA'ARI, MP  PAISAL, SKM.MARS Dr. SYAHMINAN ZULKARNAIN BAMBANG HADIYANTO, SH SUARDI, S.Sy  SATRIO WIBOWO DAMERIA  JURIANTO  HENDRI SANDRA  ZULKARNAEN ASNAR HADIYONO SUYADI SUWANDI	1769  449 93 25 16 30  40 27  31  48  45 101 69 28  27	Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai



PEMKO DUMAI

16. Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata	FAUZI EFRIZAL AFFIFUDIN	34 31	
17. Dinas Perikanan		36	
18. Dinas Perindustrian, Koperasi UKM	SEPRANEF SYAMSIR H.R BAMBANG WARDOYO, SH	54	
19. Satuan Polisi PP			
1	2		4
<u>Badan :</u>			
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SYAFI'I	32	Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
2. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	YUFRIZAL, SH, M.Si	50	
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	ERI NASRIZAL	25	
4. Badan Pendapatan Daerah	MARJOKO SANTOSO	87	
5. Badan PBD	TENGGU ISMET	39	
6. Badan Narkotika Nasional		7	
<u>Kantor :</u>			
1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	MUHAMMAD ABDUH	10	Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
<u>Rumah Sakit Umum Daerah</u>	SAIPUL	296	
<u>Kecamatan :</u>			
1. Kecamatan Dumai Timur	M. ARIFIN	46	Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
2. Kecamatan Dumai Barat	ZULFAHREN	43	
3. Kecamatan Bukit Kapur	SYAMSIR	58	
4. Kecamatan Sei. Sembilan	ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si	51	
5. Kecamatan Medang Kampai	WAN KAMARUDIN	46	
6. Kecamatan Dumai Kota	TANWIR AZHAR EFFENDI	57	
7. Kecamatan Dumai Selatan	YUSMANIDAR, M.Si	44	
Lembaga Teknis lainnya Sekretariat KPU	BUDI SURYONO	10	Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
Total		4094	

B. Ringkasan Urusan Wajib

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai merupakan kumpulan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 18 Dinas, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 5 badan, 1 Kantor dan 7 OPD Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2017, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang



**PEMKO DUMAI**

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2017 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan sistem infrastruktur penyediaan air bersih dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka meningkatkan potensi dan daya saing kota
2. Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi disektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan
3. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan
4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan
5. Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan
7. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak
8. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga Kota Dumai

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Bertitik tolak dari pemahaman tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan diatas serta dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. *Pendidikan*
2. *Kesehatan*
3. *Lingkungan Hidup.*



PEMKO DUMAI

4. *Pekerjaan Umum & Penataan Ruang*
5. *Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*
6. *Ketenaga Kerjaan dan*
7. *Sosial*

Namun demikian tidaklah berarti bahwa urusan wajib lainnya tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Dumai. Urusan-Urusan Wajib lainnya tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

Selanjutnya akan diuraikan lebih terperinci tentang pelaksanaan Urusan Wajib sebagai berikut :

## **1. Pendidikan**

### 1.1 Program dan Kegiatan

#### a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Pembangunan gedung sekolah
- Penambahan ruang kelas sekolah
- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- Pengadaan mebeluer sekolah
- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
- Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
- Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
- Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

#### b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Pembangunan gedung sekolah
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- Penambahan ruang kelas sekolah
- Penambahan ruang guru sekolah
- Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah



PEMKO DUMAI

- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
  - Pembangunan ruang ibadah
  - Pembangunan perpustakaan sekolah
  - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
  - Pengadaan mebeluer sekolah
  - Pengadaan perlengkapan sekolah
  - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
  - Pelatihan Penyusunan kurikulum
  - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
  - Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
  - Penyelenggaraan Paket A Setara SD
  - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
  - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
  - Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
  - Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
  - Penyediaan beasiswa transisi
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Se-Kota Dumai
  - Penyelenggaraan Ujian Nasional
- c. Program Pendidikan Menengah
- Pembangunan gedung Sekolah
  - Pembangunan ruang kelas Sekolah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
- e. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
  - Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
  - pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
  - Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
  - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan



PEMKO DUMAI

- Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Program manajemen pelayanan pendidikan
  - Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
  - Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
  - Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
  - Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

## **2. Kesehatan**

### **2.1 Program dan kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ;

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- b. Program Upaya kesehatan Masyarakat
  - Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
  - Kegiatan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
  - Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
  - Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
  - Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan khusus
  - Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan
  - Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
  - Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
  - Kegiatan penyuluhan masyarakat pola bersih dan hidup sehat
  - Kegiatan peringatan hari kesehatan nasional



PEMKO DUMAI

- Kegiatan peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin
  - Kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk
  - Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
  - Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular
  - Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
  - Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - Kegiatan peningkatan imunisasi
  - Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  - Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan
  - Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
  - Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
  - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama
  - Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kayu kapur
- i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
  - Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu



PEMKO DUMAI

- Kegiatan rehap sedang/berat Puskesmas
- Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
- Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Keliling
- Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
  - Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
  - Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
  - Kegiatan pelayanan kesehatan

Dalam urusan wajib bidang Kesehatan dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

#### **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

##### **1.1.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat :
  - Peningkatan pelayanan kesehatan
- b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan :
  - Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
- c. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru :
  - Pembangunan rumah sakit.
  - Pengadaan alat-alat rumah sakit.
  - Pengadaan obat-obatan rumah sakit.
  - Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
  - Pengembangan Logistik Keperawatan
- d. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru :
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
  - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD
  - Peningkatan pelayanan tenaga paramedis di RSUD
  - Peningkatan pelatihan dan pendidikan keperawatan di RSUD



PEMKO DUMAI

- f. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan RSUD
  - Pelayanan rumah sakit umum daerah Kota Dumai

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### 3.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ;

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan ;
  - Pembangunan Jalan
  - Pembangunan Jembatan
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong, melalui kegiatan :
  - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
  - Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, melalui kegiatan :
  - Perencanaan Turap/Talud/Bronjong
  - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan :
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan melalui kegiatan :
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya melalui kegiatan :
  - Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
  - Pembangunan Infrastruktur air bersih
- g. Program Pengendalian Banjir melalui kegiatan :
  - Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
  - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
  - Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendalian Banjir



PEMKO DUMAI

- h. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh melalui kegiatan :
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Bukit Kapur
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai
  - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan
- i. Program Perencanaan Tata Ruang
  - Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
- j. Program Pemamfaatan Ruang
  - Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
  - Survey dan pemetaan
  - Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
- k. Program pengendalian pemamfaatan ruang
  - Pengawasan pemamfaatan ruang

Dalam urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

#### **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

##### 3.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ;

- a. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh :
  - Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur
- b. Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan
  - Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

Dalam urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

##### 3.2.1 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;



PEMKO DUMAI

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
  - Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
  - Kegiatan Survey dan Pemetaan

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

##### 4.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan adalah :

- a. Program Pengembangan Perumahan melalui kegiatan :
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
- b. Program pengelolaan areal pemakaman melalui kegiatan :
  - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Dalam urusan wajib bidang Perumahan dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

#### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

##### 4.2.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ;

- a. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
  - Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

#### **5. Trantib Umum dan Linmas**

##### 5.2 Program dan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - Kegiatan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah
  - Kegiatan pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
  - Kegiatan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah



PEMKO DUMAI

- Kegiatan rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan
  - Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
  - Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat
- c. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
  - Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
- d. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
  - Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini masyarakat
- e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Dalam urusan wajib Trantib Umum dan Linmas dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### 5.2.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam melalui kegiatan :
  - Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
  - Kegiatan identifikasi, potensi dan dampak bencana
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana melalui kegiatan :
  - Kegiatan Koordinasi Pembanguna Daerah Rawan Bencana
- c. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - Kegiatan operasional tim reaksi cepat penanganan bencana

Dalam urusan wajib Trantib Umum dan Linmas dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

#### 5.3.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut ;

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan :



PEMKO DUMAI

- Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - Pengendalian Keamanan Lingkungan.
  - Pembinaan dan pendampingan pengawas keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal, melalui kegiatan :
- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
  - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melalui kegiatan :
- Pelaksanaan hari ulang tahun perlindungan masyarakat dan hari bela negara

## **6. Sosial**

### **6.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
  - Kegiatan pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
  - Kegiatan Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
  - Kegiatan Penanggulangan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan
  - Kegiatan Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
  - Kegiatan Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE)
  - Kegiatan penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu



PEMKO DUMAI

- Kegiatan perlindungan social terhadap pekerja imigran dan korban tindak kekerasan
- c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
  - Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- d. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
  - Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo
- e. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
  - Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
  - Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  - Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

## **7. Tenaga Kerja**

### **7.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan:
  - Kegiatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja melalui kegiatan ;
  - Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
  - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui kegiatan ;
  - Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja melalui kegiatan;
  - Kegiatan Pembinaan dewan Pengupahan



PEMKO DUMAI

## **8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### 8.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
  - Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
  - Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
  - Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
  - Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
  - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Dalam urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

### **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

#### 8.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
  - Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak
  - Kegiatan pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG



PEMKO DUMAI

## **9. Pertanahan**

### 9.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  - Kegiatan Sertifikasi Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai
  - Kegiatan inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah asset Pemerintah Kota Dumai
- b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
  - Kegiatan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Daerah Kota Dumai

## **10. Lingkungan Hidup**

### 10.1 Program dan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
  - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui kegiatan ;
  - Kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
  - Kegiatan pencemaran air
  - Kegiatan pengembangan laboratorium lingkungan hidup
  - Kegiatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)
- b. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui kegiatan ;
  - Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
  - Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan
  - Kegiatan penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
- c. Program pengendalian kebakaran hutan
  - Pembentukan dan pembinaan MPA dan Satgas



PEMKO DUMAI

- d. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
  - Pemeliharaan RTH
  - Pengembangan taman rekreasi

Dalam urusan wajib bidang lingkungan hidup dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

#### **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

##### 10.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ;

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, melalui kegiatan ;
  - Kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

### **11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

#### 11.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan :
  - Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
  - Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
  - Kegiatan pengembangan data base kependudukan
  - Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan
  - Kegiatan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
- b. Program pendataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan :
  - Kegiatan pendataan akta kelahiran
  - Kegiatan pendataan Warga Negara Asing (WNA)



PEMKO DUMAI

## **12. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### 12.1 Program dan kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
  - Kegiatan Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong
  - Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna dan
  - Kegiatan evaluasi perkembangan Kelurahan;

## **13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### 13.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Keluarga Berencana
  - Kegiatan Pelayanan KIE
  - Kegiatan pembinaan keluarga berencana
- b. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
  - Kegiatan forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
- c. Program Pelayanan Kontrasepsi
  - Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

## **14. Perhubungan**

### 14.1 Program dan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :



PEMKO DUMAI

- a. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan, melalui kegiatan :
  - Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  - Kegiatan Sosialisasi kebijakan di sektor perhubungan
  - Kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ kegiatannya ialah :
  - Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya
- c. Program Peningkatan Pelayanan angkutan kegiatannya ialah :
  - Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
  - Kegiatan penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatannya ialah :
  - Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung terminal
- e. Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas, kegiatannya ialah :
  - Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas
  - Kegiatan Pengadaan marka jalan
  - Kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum
  - Kegiatan pengadaan traffic light dan warning laight

## **15. Komunikasi dan Informatika**

### 15.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa melalui kegiatan ;
  - Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
- b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi melalui kegiatan ;
  - Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi



PEMKO DUMAI

## **16. Koperasi dan UKM**

### 16.1 Program dan kegiatan

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
  - Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
  - Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
  - Pengembangan pemasaran Produksi melalui produksi
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi.
  - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
  - Pelatihan penyusunan laporan dan neraca koperasi

## **17. Penanaman Modal**

### 17.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan public
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu
  - Kegiatan sosialisasi pelayanan terpadu
  - Kegiatan peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan
  - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - Kegiatan pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan



PEMKO DUMAI

## **18. Kepemudaan dan Olahraga**

### 18.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - Seleksi dan Pembinaan PASKIBRAKA.
- b. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
  - Kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
- c. Program pembinaan dan masyarakatan olahraga
  - Peningkatan kesejahteraan jasmani dan rekreasi
  - Penyelenggaraan kompetensi olahraga
  - Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
  - Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga

## **19. Kebudayaan**

### 19.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

## **20. Perpustakaan**

### 20.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan
  - Kegiatan masyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
  - Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan Sekolah
  - Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca



PEMKO DUMAI

## **21. Kearsipan**

### 21.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
  - Kegiatan pengumpulan data
  - Kegiatan pengklasifikasian data
- b. Program Penyelematan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah
  - Kegiatan penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
- c. Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

### C. Ringkasan Urusan Pilihan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2017 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. *Dinas Perikanan;*
2. *Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;*
3. *Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM*
4. *Dinas Perdagangan*

Namun demikian tidaklah berarti bahwa Urusan Pilihan lainnya tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Dumai. Urusan-Urusan Pilihan lainnya tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini akan diuraikan secara terperinci tentang pelaksanaan Urusan Pilihan sebagai berikut :

#### **1. Perikanan dan Kelautan**

##### 1.1 Program dan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan :
  - Pengembangan Bibit Ikan Unggul
  - Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan :



PEMKO DUMAI

- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
- Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan.
- c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - Peningkatan keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil Perikanan.
- d. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
  - Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya Tingkat Pencapaian Program

## **2. Pertanian**

### **2.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Kegiatan Peningkatan kemampuan Lembaga Petani
  - Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
  - Kegiatan peningkatan sistem intensif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
- b. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan
  - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
  - Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  - Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - Kegiatan Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan
  - Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
  - Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
- e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan melalui Kegiatan:
  - Kegiatan penanganan daerah rawan pangan
  - Kegiatan penyusunan data base potensi produk pangan
  - Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
  - Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan



PEMKO DUMAI

- Kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian

### **3. Energy dan SDM**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
  - Kegiatan pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum
  - Kegiatan pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum

### **4. Pariwisata**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
  - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
  - Kegiatan pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan
  - Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

### **5. Industry**

#### **5.1 Program dan kegiatan**

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Indutri Kecil dan Menengah



PEMKO DUMAI

- Kegiatan bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM.
- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri
  - Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
  - Kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan dan Industri Kreatif

## **6. Perdagangan**

### **6.1 Program dan Kegiatan**

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport, melalui kegiatan :
  - Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Ekspor dan Dokumen Ekspor/impor.
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  - Kegiatan peningkatan pengawasan dan pengendalian distribusi bahan pokok masyarakat
  - Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah
  - Kegiatan penambahan sarana dan prasarana pasar
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  - Kegiatan pengembangan sarana pelayanan tera/ tera ulang dan pengawasan kemetrolagian
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  - Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
  - Kegiatan Pendataan pedagang kaki lima

## **7. Transmigrasi**

Untuk Tahun 2017 urusan Transmigrasi tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2017



PEMKO DUMAI

## **D. Ringkasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

### **1. Administrasi Pemerintahan**

#### **1.1.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### **a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum**

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - Kegiatan verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol yang dapat kursi di DPRD
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
  - Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Program Penataan Daerah Otonomi Baru
  - Kegiatan percepatan penyelesaian konflik perbatasan antar daerah
  - Kegiatan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
- Program Penyebarluasan Informasi Pemerintahan daerah
  - Kegiatan penyusunan buku monografi Kota Dumai
  - Kegiatan Penyusunan data rupa-rupa bumi

##### **b. Bagian Administrasi Pembangunan**

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
  - Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - Kegiatan Pengembangan Penataan LPSE Kota Dumai
  - Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Dumai

##### **c. Bagian Administrasi Kesra**

- Program Peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan
  - Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan



PEMKO DUMAI

- Program Peningkatan Dukungan Pendidikan bagi Mahasiswa melalui kegiatan
  - Penyediaan Beasiswa
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Kegiatan koordinasi hibah/bansos
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
  - Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama
  - Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai
  - Kegiatan Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari – hari Besar Keagamaan
- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Kegiatan penyusunan database dan sistem informasi bantuan sosial dan hibah

#### **d. Bagian Administrasi Perekonomian**

- Program perencanaan pembangunan ekonomi
  - Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

#### **e. Bagian Organisasi**

- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Kegiatan Asistensi penataan organisasi perangkat daerah
  - Kegiatan bimbingan teknis penyusunan analisa jabatan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Kegiatan penyusunan laporan pencapaian pelayanan minimum SPM
- Program Penataan peraturan perundang-undangan



PEMKO DUMAI

- Kegiatan kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan

**f. Bagian Keuangan dan Aset**

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
  - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
  - Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
  - Konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah
  - Rekonsiliasi asset SKPD
  - Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD
  - Penatausahaan administrasi keuangan daerah
  - Penertiban asset

**g. Bagian Humas**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - b. Kegiatan Penyediaan dokumen kegiatan Pemerintah kota Dumai
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
  - Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
  - Kegiatan Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai
- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
  - Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
- Program kerjasama informasi dengan mass media
  - Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah
  - Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah



PEMKO DUMAI

- Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- Kegiatan pembinaan media peliput dalam bidang komunikasi dan informasi
- Kegiatan penyebarluasan informasi hari-hari besar

#### **h. Bagian Umum**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan penyediaan surat menyurat
  - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
  - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
  - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
  - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran
  - Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan Anggota DPRD
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan pembangunan gedung kantor
  - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
  - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



PEMKO DUMAI

- Kegiatan pemeliharaan taman gedung Kantor Walikota, Pendopo, PKK, dan Media center
- Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan Mess Pemda Kota Dumai diPekanbaru
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
- Program Peningkatan dan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
  - Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri
  - Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
  - Kegiatan penyediaan biaya rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah
  - Kegiatan pisah sambut muspida Kota Dumai
  - Kegiatan open house walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Dumai
- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
  - Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah
- Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari besar
  - Kegiatan peringatan hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
  - Kegiatan upacara peringatan hari kesadaran nasional

## **1.2 SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI**

### **1.2.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan ;
  - Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama



PEMKO DUMAI

- Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
- Kegiatan rapat-rapat paripurna
- Kegiatan reses
- Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
- Kegiatan kunjungan kerja komisi-komisi DPRD
- Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung
- Kegiatan Pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS, RRAPBDP, Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Laporan realisasi semester pertama beserta prognosis
- Kegiatan penyediaan alat kelengkapan DPRD

### **1.3 KECAMATAN DUMAI KOTA**

#### **1.3.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - Pembinaan pos pelayanan terpadu
  - Penilaian kinerja unit pelayanan publik
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
  - Dukungan Operasional Kelurahan
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
  - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
  - Pembinaan PKK Kecamatan



PEMKO DUMAI

#### **1.4 KECAMATAN DUMAI SELATAN**

##### **1.4.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut ;

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
  - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
  - Pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan
- c. Program Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat
  - Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan
  - Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan Publik
- d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Pembinaan Kehidupan Beragama
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
  - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
- g. Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat Kecamatan
  - Pembinaan PKK Kecamatan

#### **1.5 KECAMATAN BUKIT KAPUR**

##### **1.5.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Pembinaan kehidupan beragama
- c. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
  - Penilaian kinerja unit pelayanan public
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
  - Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan



PEMKO DUMAI

- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
  - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
  - Pembinaan PKK Kecamatan

## **1.6 KECAMATAN DUMAI BARAT**

### **1.6.1 Program dan Kegiatan**

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - Kegiatan Pembinaan pos pelayanan terpadu.
  - Penilaian kinerja unit pelayanan publik.
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Kegiatan Pembinaan kehidupan beragama.
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
  - Kegiatan Pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan.
- e. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
  - Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT.
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
  - Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
  - Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.

## **1.7 KECAMATAN DUMAI TIMUR**

### **1.7.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui kegiatan:
  - Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



PEMKO DUMAI

- b. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat melalui kegiatan :
  - Kegiatan Pembinaan Pos pelayanan terpadu di Kecamatan
  - Kegiatan Penilaian kinerja unit pelayanan publik
- c. Program Pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan :
  - Kegiatan Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan melalui kegiatan :
  - Kegiatan Dukungan operasional kelurahan
- e. Program Peningkatan kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan :
  - Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Se Kota Dumai
- f. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan :
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
  - Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
- g. Program peningkatan kinerja lembaga melalui kegiatan :
  - Kegiatan pembinaan PKK Kecamatan

## **1.8 KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

### **1.8.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
  - Penilaian kinerja unit pelayanan publik
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
  - Dukungan Operasional Kelurahan



PEMKO DUMAI

- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
  - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
  - Pembinaan PPK Kecamatan

## **1.9 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

### **1.9.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui kegiatan :
  - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
  - Penilaian kinerja unit pelayanan public
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan :
  - Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan melalui kegiatan :
  - Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan.
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan :
  - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui kegiatan :
  - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan melalui kegiatan :
  - Pembinaan PPK Kecamatan

## **1.10 Hukum**

### **1.10.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:



PEMKO DUMAI

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan :
  - Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :
  - Kegiatan Bantuan Hukum dan Pelayanan Pemerintah Kota Dumai
- c. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Kegiatan Digitalisasi Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan pembelian buku-buku Peraturan Perundang-Undangan

## **2. Pengawasan**

### **2.1 Inspektorat Kota Dumai**

#### **2.1.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan :
  - Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala,
  - Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  - Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
  - Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif.
  - Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
  - Kegiatan Meneliti dan Menilai Laporan Wajib LP2P.
  - Kegiatan Audit Khusus/Tertentu
  - Kegiatan evaluasi kinerja SKPD
  - Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan melalui kegiatan :
  - Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
  - Kegiatan *In House Training* Aparatur Pengawasan



PEMKO DUMAI

### **3. Perencanaan**

#### **3.1 Bappeda**

##### **3.1.1 Program dan Kegiatan**

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Program Pengembangan Data/ Informasi
  - Kegiatan Penyusunan profil daerah
  - Kegiatan sistem informasi perencanaan daerah
- b. Program pengembangan perumahan
  - Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
- c. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
  - Kegiatan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
- d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
  - Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
  - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat industri
  - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
  - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- e. Program pengembangan wilayah perbatasan
  - Kegiatan koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
  - Kegiatan penyusunan rancangan RPJMD
  - Kegiatan penyusunan rancangan RKPD
  - Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD
  - Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
  - Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ )
  - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
  - Kegiatan evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai



PEMKO DUMAI

- g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
  - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- h. Program perencanaan sosial budaya
  - Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
  - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM
  - Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan

#### **4. Keuangan**

##### **4.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

###### **4.1.1 Program dan Kegiatan**

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
  - Kegiatan Penyusunan standar satuan harga
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
  - Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah



PEMKO DUMAI

- Kegiatan inventarisasi asset
- Kegiatan penghapusan barang milik daerah
- Kegiatan penertiban asset
- Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU
- Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah
- Kegiatan penyusunan lapoan barang milik daerah tahunan
- Kegiatan rekonsiliasi asset SKPD
- Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD)
- Kegiatan penilaian asset/barang milik daerah
- Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang milik daerah
- Kegiatan penyusunan standar biaya
- Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD
- Kegiatan penyusunan ketentuan-ketentuan barang milik daerah

## **4.2 BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.2.1 Program dan kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan :
  - Pemeliharaan SIMPATDA.
  - Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Monitoring penyampaian SPPT PBB
  - Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah.
  - Penagihan Tunggal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai.
  - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pajak dan retribusi daerah.
  - Pelayanan prosedur pertimabangan dan keberatan pajak/ retribusi daerah



PEMKO DUMAI

- Sosialisasi dan Penyuluhan PBB
- Pemeliharaan database sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP)
- Penyusunan basis data OP PBB P2
- Verifikasi penetapan pajak.
- Pengawasan dan penertiban subjek dan objek pajak
- Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
- Validasi data piutang PBB P2
- Penyusunan peraturan perundangan tata kelola pendapatan daerah
- Monitoring penyampaian surat ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- Penilaian individual objek pajak non standar
- Penyebarluasan informasi pemerintah daerah
- Analisis dan penyempurnaan ZNT/NIR
- Verifikasi penetapan retribusi daerah
- Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah
- Penyusunan Prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang PBB P2

## **5 Kepegawaian**

### **5.1 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan;
  - Penempatan PNS
  - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
  - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
  - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
  - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
  - Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
  - Penyelenggaraan diklat prajabatan bagi CPNS daerah
  - Assesment Center Pemerintah Kota Dumai
  - Peringatan hari KORPRI



PEMKO DUMAI

#### E. Indikator Kinerja Kunci

Sebagaimana terlampir di Lampiran II.1 (Tataran pengambil kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017), Lampiran II.2 (Tataran pelaksana kebijakan 8 Aspek administrasi umum), Lampiran II.3 (Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan)



## BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

### A. Skala Prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2017 diarahkan pada

1. Dimensi pembangunan Manusia terdiri dari :
  - a. Revolusi Mental
  - b. Pembangunan Pendidikan
  - c. Pembangunan Kesehatan
  - d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Dimensi pembangunan Sektor unggulan Terdiri dari:
  - a. Kedaulatan Pangan
  - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
  - c. Kemaritiman dan Kelautan
  - d. Pariwisata
  - e. Kawasan Industri
  - f. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Dimensi pemerataan dan Kewilayahan terdiri dari:
  - a. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
  - b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
  - c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - d. Pengembangan Konektivitas Nasional

### B. Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Berdasarkan uraian diatas, maka pemerintah kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2017

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah
1	Percepatan Pembangunan Sistem Infrastruktur penyediaan air bersih dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka meningkatkan potensi dan daya saing kota	Meningkatnya cakupan pelayanan jaringan air bersih
		Meningkatnya kualitas air bersih
		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
		Meningkatnya pengelolaan penataan ruang



PEMKO DUMAI

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah
		Meningkatnya infrastruktur perkotaan
		Terwujudnya Kota Dumai yang Bersih, Indah, dan Ramah Lingkungan
		Terjaganya lingkungan kawasan pesisir
2	Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengetasan kemiskinan	Meningkatnya Pendapatan petani/peternak/nelayan
		Meningkatnya Produksi perikanan
		Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
		Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan
		Meningkatnya peran CSR dalam perekonomian
		Meningkatnya daya saing produk UMKM dan IKM
		Meningkatnya kegiatan perdagangan dan jasa
		Berkembangnya sentra industri kreatif
		Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat kota Dumai
		Menurunnya kesenjangan antar kecamatan
		Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
3	Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4	Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan	Meningkatnya kualitas pendidikan
5	Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja.	Meningkatnya investasi di kota Dumai
		Meningkatnya kerjasama antar wilayah yang berbatasan dalam aspek ekonomi
		Terwujudnya Dumai sebagai tempat tujuan investasi di pesisir sumatera dan kota terakhir kunjungan potensi ekonomi, jasa dan industri, pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang lain
		Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
7	Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



PEMKO DUMAI

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah
	masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak	Meningkatnya pelayanan kependudukan, keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
8	Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai	Meningkatnya aktualisasi seni dan budaya dan peranan pemuda dan keolahragaan dalam kehidupan masyarakat

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 61 dibawah yang menggambarkan sinkronisasi priroitas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Tabel 61

Sinkronisasi Prioritas pembangunan Tahun 2017 antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat

NASIONAL	PROVINSI	KOTA DUMAI
1. Dimensi pembangunan Manusia terdiri dari : - Revolusi Mental - Pembangunan Pendidikan - Pembangunan Kesehatan - Pembangunan Perumahan dan Permukiman	1. Pembangunan Dan Pemantapan Infrastruktur	1. Percepatan Pembangunan Sistem Infrastruktur penyediaan air bersih dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka meningkatkan potensi dan daya saing kota
2. Dimensi pembangunan Sektor unggulan terdiri dari: - Kedaulatan Pangan - Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan - Kemaritiman dan Kelautan - Pariwisata - Kawasan Industri - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	2. Pemantapan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan
3. Dimensi pemerataan dan Kewilayahan Terdiri dari: - Pemerataan Antarkelompok Pendapatan - Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal - Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan - Pengembangan Konektivitas Nasional	3. Peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat	3. Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengetasan kemiskinan 4. Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja.



PEMKO DUMAI

NASIONAL	PROVINSI	KOTA DUMAI
	4.Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	5. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan 6. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan 7. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak
	5.Pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan	8. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai



PEMKO DUMAI

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan Yang diterima**

##### **1. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum bagi Tugas Pembantuan Yang diterima adalah :

- 1.1 SP-DIPA Nomor : DIPA-018.04.4.099315/2017 dari Direktorat jenderal Hortikultura Tanggal 28 Januari 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 050/SK/DIS-TPH-BUN/556 Tanggal 03 Februari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola kegiatan anggaran APBN Lingkup Dirjen Hortikultura Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau TA 2017.
- 1.2 SP-DIPA Nomor : DIPA-018.04.3.099314/2016 Tanggal 07 Desember 2017 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 050/SK/DIS-TPH-BUN/555 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN Lingkup Dirjen Tanaman Pangan DK dan TP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau TA. 2017.
- 1.3 SP-DIPA-018.11.3.099426/2016 Tanggal 07 Desember 2017 dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan SK KPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Nomor : OT.210/01/SATKER-BPR/2017 Tanggal 28 Januari 2017 tentang Penunjukan/penetapan pelaksana anggaran/kegiatan dekonsentrasi BKP Provinsi Riau di Kota Dumai
- 1.4 Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik

##### **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah :

- 2.1 Direktorat Jenderal Hortikultura
- 2.2 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- 2.3 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
- 2.4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



#### PEMKO DUMAI

### 3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah :

- 3.1 Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura
  - Kegiatan Pengembangan kawasan cabe merah dan sayuran dataran rendah
- 3.2 Program Peningkatan produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan
  - Kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal
- 3.3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan
  - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
- 3.4 Program DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar
  - Kegiatan Rehab Puskesmas Bumi Ayu
  - Kegiatan Rehab Puskesmas Dumai Barat
  - Kegiatan Pengadaan Generator Set
  - Kegiatan Pembuatan sarana air bersih berupa sumur bor dalam
  - Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
  - Kegiatan pengadaan tablet pendataan keluarga
  - Kegiatan pengadaan ambulans untuk SPGDT
- 3.5 Program DAK Fisik Subbidang pelayanan kefarmasian
  - Kegiatan Penyediaan bahan medis habis pakai

#### **B. Tugas Pembantuan Yang diberikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Secara Administratif di Kota Dumai tidak terdapat adanya wilayah Desa melainkan wilayah Kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Dumai dalam wilayah Kerja Kecamatan. Oleh karenanya maka tidak terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai.



## BAB VI

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### A. Kerjasama Antar Daerah

##### 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

- 1.1 SMA Negeri 1 Padang Panjang
- 1.2 Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD)
- 1.3 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

##### 2. Dasar Hukum

- 2.1 Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang Nomor : 421.3/2011/268 Tanggal 05 April 2011
- 2.2 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) Nomor : 40/KLH/2014 Tanggal 17 Desember 2014
- 2.3 Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai Nomor : HK.05.01/II/1005/2016 dan Nomor 5/DINKES/2016 Tanggal 05 April 2016

##### 3. Bidang Kerjasama

- 3.1 Bidang Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah menjalin kemitraan dalam bentuk Sister School
- 3.2 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan



PEMKO DUMAI

Gambut (BP-REDD) adalah pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+)

- 3.3 Bidang Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pelaksanaan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat

#### 4. Nama Kegiatan

- 4.1 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah :
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kreativitas Siswa
  - Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Siswa
  - Pengembangan Muatan Lokal
  - Pertukaran Siswa
  - Pertukaran Guru
- 4.2 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah
- Persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Program REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau
  - Integrasi strategi daerah REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau
  - Pengembangan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan ditingkat daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau
  - Pengembangan berbagai program dan kegiatan strategis untuk implementasi REDD+ secara penuh termasuk dalam rangka penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau
  - Perubahan paradigma dan budaya kerja diseluruh elemen pemangku kepentingan terkait yang dibutuhkan untuk menyukseskan REDD+ di Provinsi Riau
  - Pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan REDD+



PEMKO DUMAI

- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (terutama lahan gambut)
- 4.4 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah :
- Memfasilitasi Pihak kedua dalam pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat sampai dengan penyampaian hasil seleksi kepada Pihak Kedua
  - Melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP oleh Kepala Badan kepegawaian Negara dilakukan secara bersama-sama para pihak; dan
  - melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan
  - menyampaikan usulan rincian kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat kepada Menpan dan rb dan Kepala BKN
  - melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan Nomor Induk Pegawai oleh Kepala BKN dilakukan secara bersama-sama
  - menetapkan kelulusan dan mengumumkan kelulusan dengan SK Gubernur/Walikota berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Pihak Kesatu
  - menetapkan keputusan pengangkatan sebagai CPNS di Lingkungan Pemko Dumai
  - menempatkan dan mendayagunakan CPNS di Lingkungan Pemko Dumai sesuai dengan penetapan kebutuhan
5. Jangka Waktu kerjasama
- 5.1 Jangka Waktu Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan
- 5.2 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah 5(lima) Tahun



PEMKO DUMAI

- 5.3 Jangka Waktu Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah 2(dua) Tahun

## **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

- 1.1 Abadi Megah Promosindo
- 1.2 PT. Inti Griya Prima Sakti
- 1.3 PT. Sari Dumai sejati
- 1.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai
- 1.5 PT. Pelindo (Persero)
- 1.6 PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelindo
- 1.7 PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera
- 1.8 PT. Batam Bahari Sejahtera
- 1.9 PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari
- 1.10 SMP Darma Yudha Pekanbaru
- 1.11 PT. (Persero) PELINDO I Dumai
- 1.12 PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero)
- 1.13 PT. Pembangunan Dumai
- 1.14 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai
- 1.15 Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
- 1.16 PT. Mayatama Solusindo
- 1.17 Kepolisian Resor Dumai
- 1.18 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
- 1.19 Badan Informasi Geospasial
- 1.20 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
- 1.21 Perum Bulog Divisi Regional Dumai

### **2. Dasar Hukum**

- 2.1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo tentang Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur Nomor. 03/Parbudpora/2007 tanggal 30 Maret 2007.



**PEMKO DUMAI**

- 2.2 File Memorandum of Understanding (MOU) PT. Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Kota Dumai tentang Pembangunan Plasa Dumai Nomor 570/Disperindagkopin/2007/253 dan Nomor 12/IGPS-SMG/DM/IV07 tanggal 4 April 2007
- 2.3 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai Sejati Nomor 570/Disperindagkopin/2007/786 dan Nomor 035/SDS/VIII/EXT/07 tanggal 3 Agustus 2007
- 2.4 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai tentang Pengembangan kurikulum lalu lintas pada satuan pendidikan TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, dan SMA / MA / SMK Nomor 18/Disdik/2008 dan No. Pol B/979/XI/2008/Polresta Dumai tanggal 10 November 2008
- 2.5 Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tentang Kerjasama Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai Nomor US.13/3/7/PI-09 dan Nomor 11/Dishub/2009 Tanggal 20 Agustus 2009
- 2.6 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pembagian Jasa Labuh di Terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai Nomor 19/Dishub/2009, Nomor 015/I 10100/2009-SO, Nomor US.12/4/17/PI-09 Tanggal 24 November 2009
- 2.7 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera tentang Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional Tanggal 10 Mei 2011
- 2.8 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011
- 2.9 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011
- 2.10 Nota Kesepahaman antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru tentang Kemitraan Antar Sekolah Nomor 421.3/SMPN2/2011/016 dan Nomor 115/SMP-DY/MOU/2011/001 tanggal 19 Januari 2011
- 2.11 MoU antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai nomor 379/PEMB/III/2002 dan US.11/1/5/P.I-2002



**PEMKO DUMAI**

- 2.12 Perjanjian Kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 0267 / DMI / 2014 dan nomor : 29 / Dishub / 2014
  - 2.13 Perjanjian pengelolaan pantai marina teluk makmur antar Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai Nomor : 281/DISBUDPARPORA/2015 dan Nomor : 117/PDM-DMI/VII/2015-112
  - 2.14 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Nomor : 8/Bapenda/2017 dan Nomor : 01.1 PJ/AGA.01.01/ADUM/2017
  - 2.15 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor : 14/Dishub/2017
  - 2.16 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo Nomor : 27/DPMPTSP/2017 dan Nomor : MY/PKS/1017001
  - 2.17 Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 13/1449/X/17 dan Nomor : 25/HK-HAM/2017
  - 2.18 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 21/Bappeda/2017 dan Nomor : MoU-7/PW04/3/2017
  - 2.19 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial Nomor : 28/Bappeda/2017 dan Nomor : B-3.4/SESMA/PK/11/2017
  - 2.20 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 2/Inspektorat/2017 dan Nomor : MoU-1/PW04/3/2017
  - 2.21 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai Nomor : 10/Dinsos/2017 dan Nomor : 002/Bulog/2017
3. Bidang Kerjasama
- 3.1 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah dibidang Pariwisata
  - 3.2 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah dibidang Jasa Kontruksi
  - 3.3 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah dibidang Infrastruktur



**PEMKO DUMAI**

- 3.4 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah dibidang tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum di bidang lalu lintas
- 3.5 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa Kepelabuhanan Diwilayah Perairan Kota Dumai)
- 3.6 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa labuh di terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai)
- 3.7 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional)
- 3.8 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)
- 3.9 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)
- 3.10 Bidang Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah dibidang Pendidikan
- 3.11 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai
- 3.12 Bidang kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Penempatan dan penggunaan X-Ray Scanner pada Bandar Udara Pinang Kampai Dumai
- 3.13 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah pengelolaan pantai marina teluk makmur
- 3.14 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Kota
- 3.15 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Pinang Kampai Dumai



**PEMKO DUMAI**

- 3.16 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah kerjasama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai
- 3.17 Bidang Kerjasama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah penelusuran dan pembinaan siswa/i yang berprestasi dalam penerimaan calon anggota Polri
- 3.18 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah asistensi manajemen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Dumai
- 3.19 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai
- 3.20 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pengembangan manajemen Pemerintah Daerah
- 3.21 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah penyaluran beras sejahtera (rastra) untuk keluarga penerima manfaat secara gratis Kota Dumai TA. 2017

**4. Nama Kegiatan**

- 4.1 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur
- 4.2 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah Pembangunan Gedung Plasa Dumai
- 4.3 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah Pembangunan Peningkatan ruas jalan Purnama-Lubuk Gaung sepanjang lebih Kurang 10,2 km, lebar 6 meter, bahu kiri kanan jalan 0,5 meter dengan muatan sumbu terbesar 8 ton kelas jalan III A serta melakukan perawatan dan perbaikan jalan tersebut diatas
- 4.4 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah :
  - a. Pelatihan/Sosialisasi terhadap para tenaga pendidik yang ditunjuk di seluruh Wilayah Kota Dumai
  - b. Sosialisasi pembinaan materi pendidikan tertib lalu lintas pada satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK



- c. Penganggaran pengadaan kebutuhan/bahan ajar dan sarana fasilitas pada tiap-tiap Sekolah berkaitan dalam pemberian materi tertib lalu lintas
- 4.5 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Penunjang lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai antara lain : Jasa Pergudangan, Bisnis Logistik, Distribution Centre dan lainnya serta pengembangan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang dan Ro-Ro di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai
- 4.6 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Pembagian dari hasil Jasa Labuh
- 4.7 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan
- 4.8 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang
- 4.9 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang
- 4.10 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah :
- Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
  - Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
  - Siswa dibawah pengawasan guru, saling bertukar tugas sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
  - Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
  - Mempromosikan hubungan kerjasama ini di Media Lokal
- 4.11 Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai
- 4.12 Kegiatan yang dilaksanakan antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah pemasangan dan penempatan X-Ray Scanner di Bandar Udara
- 4.13 Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah bahwa pihak pertama yakni Pemerintah Kota Dumai memiliki aset berupa Pantai Marina Teluk Makmur yang terletak di Kecamatan medang Kampai Kelurahan Teluk Makmur, dalam melaksanakan dan mendukung



program pariwisata Kota Dumai, Pihak pertama membutuhkan bantuan Pihak kedua yakni PT. Pembangunan Dumai berupa pengelolaan Pantai marina berdasarkan sura no. 102.01/PDM-DMI/V/2015-073 perihya permohonan izin untuk mengelola Pantai Puak Marina Bahari

- 4.14 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah mekanisme pembayaran rekening listrik pihak Pemerintah Kota dan PPJ, Penertiban PJU-Swadaya, Meterisasi PJU dan pembangunan dan pemeliharaan PJU
- 4.15 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : 1. bidang teknis dan operasi, 2. bidang SDM dan 3. bidang aset dan keuangan
- 4.16 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki, menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif untuk menyelesaikan setiap hambatan serta membentuk tim kerja untuk mempersiapkan data dan informasi serta mengusulkan langkah dalam rangka percepatan pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai
- 4.17 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah tukar menukar informasi tentang penerimaan anggota Polri baik Taruna/i, Brigadir maupun Tantama Polri, melakukan penelusuran dan penyediaan putra/i yang memenuhi kriteria sebagai putra/putri Dumai yang berprestasi bagi calon anggota Polri
- 4.18 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Asistensi manajemen perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemko Dumai dan penggunaan aplikasi Simda perencanaan
- 4.19 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai
- 4.20 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah



**PEMKO DUMAI**

- 4.21 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah penyaluran beras untuk keluarga penerima manfaat beras sejahtera secara gratis tahun 2017
5. Jangka Waktu kerjasama
- 5.1 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah selama 20 (dua puluh) tahun
- 5.2 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pembangunan Plasa Dumai selesai dan diresmikan.
- 5.3 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- 5.4 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku
- 5.5 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.6 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.7 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.8 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.9 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.10 Jangka Waktu Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah tidak terbatas
- 5.11 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah berlaku sampai adanya kesepakatan lain yang disetujui oleh kedua pihak
- 5.12 Jangka Waktu Kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah selama 3 (tiga) Tahun



**PEMKO DUMAI**

- 5.13 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.14 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.15 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah berlaku sepanjang pelayanan navigasi penerbangan masih dilaksanakan
- 5.16 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.17 Jangka Waktu Kerjasama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah selama 1(satu) Tahun
- 5.18 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun
- 5.19 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.20 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun
- 5.21 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah selama 1(satu) Tahun

**B. Kerjasama Dengan Luar Negeri**

Untuk Tahun 2017 tidak terdapat pelaksanaan Kerjasama dengan Luar Negeri

**C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

1. Forum Komunikasi

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah maka Pemerintah Kota Dumai menjalin hubungan dan komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan dengan Instansi-Instansi Vertikal yang ada maupun dengan aparaturnya Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidental yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dimana permasalahan tersebut membutuhkan penanganan secara integratif dari berbagai komponen yang ada. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai



dilaksanakan melalui Wadah atau Forum Komunikasi yang mana keberadaan Forum Komunikasi atau Wadah dimaksud diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan Unit Kerja atau Instansi yang tergabung atau harus diikutsertakan di dalam Forum Komunikasi tersebut.

Disamping melakukan koordinasi melalui Forum Komunikasi tersebut, melakukan koordinasi dan komunikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui kerjasama dari semua pihak kepada Instansi atau Aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Adapun Forum Komunikasi yang keberadaannya diatur menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi ;

- 1.1. Forum MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah)
- 1.2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

## 2. Materi Koordinasi

### 2.1. Forum MUSPIDA

Adapun materi yang dibahas didalam rapat Muspida antara lain menyangkut masalah pertahanan dan keamanan ( meliputi pertahanan dan keamanan darat, laut dan Udara), Kamtibmas, masalah tindak pidana, masalah ketertiban umum, penyakit masyarakat serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dipandang dapat menimbulkan dampak negatif yang berskala luas yang pada gilirannya akan mengganggu ketenangan ditengah masyarakat serta menghambat dan mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah.

Disamping itu pada setiap pertemuan atau Rapat Muspida juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat aktual yang menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Pemerintah Daerah sendiri, seperti kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan dalam rangka menyambut perayaan hari-hari besar agama, penyambutan tahun baru masehi, persiapan kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah Pusat lainnya, serta permasalahan sosial lainnya yang bersifat aktual dan mendesak.

### 2.2. Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA)

Komunitas Intelijen Daerah merupakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh Kominda Kota Dumai memiliki agenda pertemuan antara lain ; menerima informasi (Informasi



intelen) dari seluruh anggota Kominda tentang setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya permasalahan yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun keresahan ditengah masyarakat seperti masalah narkoba, penjualan minuman keras, kegiatan prostitusi terselubung, pelanggaran peraturan perundang-undangan serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta dampak sosial lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan di Daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, informasi yang diterima sebagaimana disebutkan diatas akan ditindaklanjuti melalui Unit Kerja terkait guna penyelesaian lebih lanjut. Pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominda Kota Dumai adalah bersifat preventif dalam arti berupaya mendeteksi secara dini timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Daerah.

### 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

#### 3.1. Forum MUSPIDA

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah diatur tentang instansi yang tergabung didalam unsur Muspida yaitu

- Pemerintah Daerah ( dalam hal ini Walikota Dumai);
- Komando Distrik Militer (Kodim 0303 BKLS);
- Kepolisian Resort Kota ;
- Pengadilan Negeri; dan
- Kejaksaan Negeri.

Namun demikian, mengingat masih terdapatnya Instansi atau Unit Kerja lain yang dipandang memiliki kapasitas setingkat dengan unsur Muspida, maka Forum Komunikasi Muspida di Kota Dumai juga dengan mengikutsertakan Instansi atau Unit Kerja dimaksud. Adapun Instansi atau Unit Kerja setingkat Muspida tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Muspida Plus Kota Dumai yaitu :

- Pimpinan DPRD Kota Dumai (dalam hal ini Ketua DPRD Kota Dumai);
- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal Kota Dumai),
- Satuan Radar 232 Dumai (Dansatradar 232 Dumai);
- Detasemen Rudal 004 (Dan Den Rudal 004); dan
- Komandan Kompi Senapan A 132 Bagan Besar (Dan Kipan A 132)
- Sub Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat (Dan sub Den POM AD)



PEMKO DUMAI

### 3.2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah bahwa yang tergabung dalam unsur Kominda Kota Dumai adalah :

- Walikota Dumai beserta Unsur Muspida Kota Dumai (bertindak selaku Dewan Pembina Kominda) ;
- Wakil Walikota Dumai (Selaku Ketua Kominda) ;
- Unsur Kodim 0303 BKLS (Pasi Intel Kodim selaku Wakil Ketua I Kominda) ;
- Unsur Polresta Dumai (Kasat Intelkam Polresta selaku Wakil Ketua II Kominda) ;
- Pos Daerah/Posda Badan Intelijen Daerah ;
- Unsur Kejaksaan Negeri Dumai (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai) ;
- Unsur Imigrasi Kota Dumai ;
- Unsur Bea dan Cukai Kota Dumai ;
- Unsur Satuan Radar 232 (Kasi Intel Satradar 232 Dumai) ; dan
- Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut (Kasi Intel Lanal Dumai).

#### 4. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui Forum Kominda selama Tahun 2017 sebanyak 10 kali pertemuan, dari jumlah pertemuan tersebut belum termasuk dengan koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan non formal dan bersifat insidental.

#### 5. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Jalinan Kerjasama yang dibina oleh Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal di Daerah yang dilakukan melalui Forum Muspida dan Kominda maupun melalui forum lainnya jelas sangat memberikan hasil yang bersifat positif bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan untuk kemajuan Kota Dumai pada umumnya.

Koordinasi tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk saling berbagi (sharing) informasi tentang kondisi aktual yang ada, sebagai wadah untuk mencari solusi guna penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian permasalahan yang ada dapat lebih cepat dan efektif, sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama, menyamakan cara pandang dan persepsi serta saling bersinergi antara pemerintah Daerah dengan aparaturnya pemerintah pusat di Daerah.

Disamping itu dengan dilakukannya koordinasi maka dapat ditempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dalam upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan yang diperkirakan akan terjadi. Terciptanya suasana Kota Dumai yang kondusif serta berhasilnya pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan lainnya adalah



**PEMKO DUMAI**

merupakan salah satu hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal yang ada di Daerah.

**6. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi**

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap koordinasi yang dilakukan akan ditindaklanjuti secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing Instansi/Unit kerja.

**7. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Kota Dumai menjalin kerjasama dengan semua instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat yang ada di Daerah, baik instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat tersebut tergabung ke dalam Forum Komunikasi yang telah diatur keberadaannya menurut peraturan perundangan maupun yang tidak tergabung kedalam Forum Komunikasi dimaksud. Diantaranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama atau koordinasi yang baik dengan aparatur Departemen Agama yang ada di Daerah melalui Kantor Departemen Agama Kota Dumai, pihak Imigrasi Kota Dumai, Bea dan cukai, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta berbagai instansi lainnya yang ada di Daerah. Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan pertemuan lainnya baik yang bersifat formal maupun informal.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, mendapatkan dukungan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

**D. Pembinaan Batas Wilayah**

Penegasan Batas wilayah, baik batas antar kecamatan dan antar kelurahan dilindungi Pemerintah Kota Dumai maupun batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten lainnya (khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir) tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Dumai, karena penegasan batas wilayah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai saat terbentuknya Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, belum diikuti dengan adanya penegasan batas wilayah yang jelas dan pasti dilapangan antara Kota Dumai sebagai Daerah Otonom yang baru dengan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk. Begitu juga halnya dengan penegasan batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir yang juga merupakan Daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Disamping itu mengenai penegasan Batas baik antar kelurahan maupun antar kecamatan



**PEMKO DUMAI**

dilingkungan Pemerintah kota Dumai belum ditetapkan secara pasti dilapangan dalam arti belum dilakukan pemasangan Pilar Batas, namun demikian mulai sejak tahun 2005-2010 upaya penegasan batas tersebut sudah mulai dilaksanakan, yaitu ;

a. Batas Wilayah Kabupaten/Kota

- Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis  
Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.
- Batas wilayah kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir  
Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun perangkat batas daerah di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan aspek kewenangan dalam mengelola suatu daerah berbasis keruangan meliputi penataan dan penegasan batas, dalam rangka tertib administrasi kewilayahan.

Tujuan dan sasarannya adalah dengan adanya perangkat batas wilayah yang tegas dalam hal ini adalah melengkapi keberadaan pilar batas Kabupaten/Kota dan pilar batas Kecamatan/Kelurahan dengan melakukan pengukuran posisi, maupun perangkat batas yang lainnya (seperti koordinat batas, berita acara penetapan batas, peta batas dll), dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi daerah untuk mengelola dan menata daerahnya dalam frame wilayah batas yang jelas.

b. Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Tahun 2005 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat dan Lurah melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai

Tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur beserta kelurahan yang ada diwilayah kecamatan tersebut



**PEMKO DUMAI**

melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur

Tahun 2008 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Sugai Sembilan beserta Kelurahan melakukan kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan Batu Teritib, Basilam Baru dan Kelurahan Tanjung Penyembal Koata Dumai.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pelacakan batas-batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai, membuat deskripsi batas dan peta administrasi kelurahan dan kecamatan, melakukan koreksi terhadap peta administrasi yang selama ini dipakai serta mengadakan musyawarah kesepakatan batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai

Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah mendapatkan batas kelurahan dan kecamatan yang definitif, dan akomodatif, menyelesaikan permasalahan batas administrasi baik pada tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan serta menyiapkan dokumen batas yang dapat dipergunakan untuk rencana pemekaran wilayah maupun pembuatan Perda batas antar kelurahan dan kecamatan.

Dari tahun 2011-2017 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai khususnya pada penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis serta Kabupaten Rokan Hilir.

**1. Penyelesaian Batas Daerah**

Dalam pembinaan batas wilayah tersebut Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian Batas Daerah sebagai berikut :

**a. Batas Wilayah Kabupaten/Kota**

➤ **Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis**

**Tahun 2011**

Kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahun 2006 menimbulkan permasalahan dilapangan, sehingga Pemerintah Kota Dumai meminta peninjauan ulang kembali atas kesepakatan dimaksud dan untuk penyelesaian batas wilayah tersebut kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai. Dan oleh Gubernur sebagai fasilitator dalam penyelesaian batas wilayah antara Kota



PEMKO DUMAI

Dumai dengan Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

Tahun 2017

1. Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Rapat Fasilitasi percepatan penyelesaian Batas Antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Batas Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 (tiga) Kali
2. Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan melaksanakan Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau yang bertempat di Ruang Rapat Hotel Ayola, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
  1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah memberikan draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Koreksi 1 Tanggal 11-13 April 2017 kepada Pemerintah Kota Dumai dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar dibahas dengan Tim PBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk meminta koreksi Kabupaten/Kota yang berbatasan terhadap :
    - a. Dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang masuk dalam rancangan Permendagri;
    - b. Koordinat batas (PBU/PABU, TK) dan garis batas antar titik koordinat batas
    - c. Perubahan-perubahan/koreksi (nama desa/kelurahan, kecamatan, toponimi rupabumi)
  2. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengusulkan titik simpul batas sementara antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis yaitu pada P.13 koordinat  $01^{\circ} 28' 27.852''$  LU dan  $101^{\circ} 19' 1.869''$  BT dengan pertimbangan :
    - a. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.14 dengan koordinat  $01^{\circ} 29' 45.549''$  LU dan  $101^{\circ} 20' 7.674''$  BT.
    - b. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.12 dengan koordinat  $01^{\circ} 28' 2.79''$  LU dan  $101^{\circ} 20' 25.93''$  BT



3. Terhadap usulan tersebut pada nomor 2 (dua) diatas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten yang berbatasan serta melakukan verifikasi terhadap titik simpul tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini
  4. Jika sampai pada waktu yang telah disepakati tersebut tidak ada laporan melalui Pemerintah provinsi Riau, maka Pemerintah Kabupaten bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dianggap sepakat terhadap koordinat titik simpul batas sementara usulan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan tersebut pada angka 2 (dua) diatas.
  5. Pada rapat ini belum membahas segmen batas antara Kabupaten bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir
  6. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk saling dipertukarkan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini. Data-data pendukung dan dokumen batas yang diserahkan bersifat final
  7. Waktu verifikasi batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis akan ditentukan oleh Pemerintah provinsi Riau setelah berkoordinasi dengan Dijen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
3. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014



Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

4. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama (Berita Acara Terlampir) Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama

b. Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Dari tahun 2009-2016 kegiatan pelacakan dan penetapan batas Kecamatan dan Kelurahan belum ada ditindak-lanjuti dan terfokus pada kegiatan Batas antar Daerah Kabupaten/Kota.

Tahun 2017

1. Lokasi kegiatan Survey tapal batas wilayah antar Kecamatan Medang Kampai – Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan – Bukit Kapur yang terletak pada :
  - a. Kecamatan Dumai Timur, yang terletak di Kelurahan Tanjung Palas
  - b. Kecamatan Medang Kampai, yang terletak di Kelurahan Mundam
  - c. Kecamatan Bukit Kapur, yang terletak di Kelurahan Bagan Besar
  - d. Kecamatan Dumai Selatan, yang terletak di Kelurahan Bukit Timah dan Kelurahan Mekar Sari
2. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Medang Kampai – Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan – Bukit Kapur melibatkan Tim Survey dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Bagian Administrasi pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai serta pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT di wilayah perbatasan antar Kecamatan
3. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Dumai Selatan dengan Kecamatan Bukit Kapur, lokasi Kelurahan Bagan Besar dengan Kelurahan Bukit Timah, terdapat 8 (delapan) Tugu Batas yang diawali dari Jalan Mekar Sari Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan berakhir pada Jalan Perwira/Tuanku Tambusai, dapat disampaikan perihal sebagai berikut :



- a. Dari 8 (delapan) tugu batas yang berada di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan masih utuh keberadaannya sesuai dengan titik koordinat yang telah disepakati sesuai dengan hasil laporan pelacakan tahun 2007
  - b. Terdapat perbedaan peta lampiran berita acara kesepakatan batas daerah antara Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kecamatan Bukit Kapur yang ditanda-tangani oleh camat dan lurah, dengan peta yang ditanda tangani oleh camat dan Kepala Daerah, yaitu pada letak posisi tugu batas 4 (empat).
  - c. Dari titik lokasi tugu batas 5 (lima) menuju lokasi titik tugu batas 6 (enam) dengan garis batas zik-zak dalam peta, batas alam dilapangan tidak ditemukan (maya).
4. Survey Tapal Batas Pada batas daerah antara Kelurahan Mekar sari Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur terdapat 4 (empat) Tugu Batas di lokasi Kelurahan Bagan Besar dengan Kelurahan Mekar Sari, yang diawali dari Jalan Muhammad Toha dan berakhir pada parit Hawa menuju anak sungai Masjid, dapat disampaikan bahwa keberadaan dari ke 4 (empat) tugu batas tersebut masih utuh dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007 dan batas alam seperti sungai dan parit yang disepakati sebagai batas daerah cukup jelas dilapangan, terkecuali batas jalan yang ditetapkan dari Jalan Muhammad Toha menuju Jalan PT. Gudang Garam dimana jalan tersebut merupakan Jalan Masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertaniannya dan jalan tersebut keberadaannya diatas lahan masyarakat serta kondisi di lapangan tidak ditemukan.
5. Survey Tapal Batas antar Kecamatan Dumai Timur dengan Kecamatan Medang Kampai di lokasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai dan Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur terdapat 6 (enam) Tugu Batas, dapat disampaikan sebagai berikut ;
- a. Tugu Batas 1, 2, 3, 5 dan 6 masih utuh keberadaannya dan sesuai dengan titik koordinat hasil laporan pelacakan tahun 2007,
  - b. Antara tugu batas 3 (tiga) menuju tugu batas 4 (empat) ditemukan tugu batas yang tidak terdapat titik koordinat pada hasil laporan pelacakan 2007, dimana posisi tugu batas tersebut pada titik koordinat 1°39'19"2 N dan 101°28'49"3 E
  - c. Tugu batas 4 (empat) tidak ditemukan dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007



PEMKO DUMAI

### 3. Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota

#### 3.1 Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah Lain

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa Daerah yang secara administratif dan secara geografis berbatasan secara langsung dengan Wilayah Kota Dumai adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum tidak ditemukan adanya permasalahan yang menonjol sebagai akibat belum ditegaskannya batas antara Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir tersebut. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan batas tersebut. Namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan batas ini dikemudian hari maka Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaian dan penegasan batas wilayah dimaksud.

Adapun Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km) dimana wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242, 098 meter (100, 242 Km) dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan.

#### 3.2 Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam hal masalah batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sampai saat ini memang belum dilaksanakan penegasan batas dilapangan secara keseluruhan. Selain itu juga belum ditemukan adanya permasalahan yang menonjol yang terjadi sebagai akibat belum adanya penegasan batas dimaksud.

Namun demikian, untuk tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan harus dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan selesai.

### 4 Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

#### 4.1 Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah lain

Untuk mewujudkan batas Daerah yang jelas dan pasti baik secara Yuridis maupun fisik dilapangan maka penegasan batas daerah harus dilakukan.



Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa Penegasan Batas Daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Berkaitan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai. Tim ini akan bekerjasama dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Mekanisme kerja dan tahapan yang dilakukan dalam penegasan Batas Daerah tentunya sesuai dengan yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas antara lain ; penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas.

Dalam hal batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan/ditegaskan melalui pemasangan pilar batas pada tahun 2006 yang lalu. Dari jumlah 100.242,098 meter (100,242 Km) wilayah yang berbatasan telah dapat disepakati penyelesaiannya secara keseluruhan

Mengenai tata batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis juga sudah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penegasan batas secara pasti dilapangan bersama pihak Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar wilayah yang berbatasan sudah dapat dilakukan penegasan batas dilapangan. Dari jumlah yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km), telah dapat ditegaskan dilapangan sepanjang lebih kurang 45 km. Sedangkan sebagian kecil lainnya saat ini sedang dalam proses penyelesaian antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau, dan telah direkomendasikan oleh Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

#### 4.2 Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penegasan batas wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping itu penegasan batas tersebut diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan.



Pada Tahun 2007 sudah dapat diselesaikan atau dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kecamatan Bukit Kapur dengan Kecamatan Dumai Barat sepanjang 12, 20 Km (telah selesai secara keseluruhan/100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai timur dengan Kecamatan Medang Kampai sepanjang 13, 30 Km (telah selesai secara keseluruhan/ 100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 4,50 Km (masih terdapat yang belum diselesaikan sepanjang 12 Km)

Pada Tahun 2008 sudah dilakukan pelacakan batas dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kelurahan Batu Teritib dengan Basilam Baru dan Kelurahan Basilam Baru dengan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 40 Km (telah selesai secara keseluruhan/100 %)

Pada Tahun 2017 sudah dilaksanakan survey kembali batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur dan menghasilkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2017 tentang batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur

## **E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana**

### **a. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Adapun bencana yang terjadi disepanjang tahun 2016 adalah kejadian kebakaran pada hutan dan lahan.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman secara cepat pada saat terjadinya musibah kebakaran oleh petugas bersama-sama dengan dukungan dari warga masyarakat dimana lokasi kebakaran itu terjadi.

### **b. Status Bencana**

Kejadian kebakaran yang terjadi pada Hutan dan lahan status kebakarannya bersifat Regional bahkan bersifat nasional.

### **c. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Daerah sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain adalah :



**PEMKO DUMAI**

- Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi khususnya melakukan upaya antisipasi antara lain; tidak melakukan pembakaran lahan didalam membuka/mengerjakan lahan yang dimiliki, menjaga keamanan dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan perumahan seperti mematikan kompor dan peralatan dapur/listrik pada saat tidak dibutuhkan dan lain sebagainya.

**d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

**e. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi**

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan.

**F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 butir 19, bahwa yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Propinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dimaksud antara lain untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan Daerah.

Bertolak dari pengertian Kawasan Khusus diatas, untuk Kota Dumai sampai saat ini belum terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Khusus. Namun demikian upaya untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Dumai menjadi Kawasan Khusus saat ini sedang dilakukan, yaitu menjadikan Kawasan Industri Dumai yang bertempat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI),



PEMKO DUMAI

dimana keinginan Pemerintah Kota Dumai tersebut sudah disampaikan kepada Pihak Propinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- a. Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).

Pada tahun 2017 tidak terdapat kejadian yang dapat menyebabkan gangguan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

- b. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala yang dialami yaitu berupa terbatasnya dana dan perlengkapan yang dimiliki.

- c. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Apabila ditemukannya adanya gangguan keamanan biasanya aparat keamanan tetap diikutsertakan.

## BAB VII PENUTUP

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Dumai Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Didalam Laporan ini dijelaskan tentang Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang meliputi Prioritas Urusan Wajib dan Prioritas Urusan Pilihan, dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan, yang diuraikan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, jumlah anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan, dan permasalahan yang ditemukan serta solusi yang diharapkan.

Sangat disadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun kendala sehingga Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, baik permasalahan maupun kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada. Permasalahan, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada Tahun Anggaran 2017 dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Kita berharap pada tahun mendatang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan sukses.

Dumai, Maret 2018

**WALIKOTA DUMAI**



**H. ZULKIFLI AS**

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM EKKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**KOTA DUMAI**

NO	ASPEK	FOKUS	IKK	Rumus	Jenis Data	CAPAIAN KINERJA	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	1 Keberadaan PERDA IMB	Ada atau tidak ada Perda	PERWA Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 ttg Pedoman penerbitan IMB Gedung di Kota Dumai	ada	Bagian Hukum Setda
			2 Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi Jumlah Rumah Seluruhnya	Jumlah Rumah ber IMB sd. Akhir Tahun 2017, sebanyak 2.037 unit  2005 s/d 2016 = 1.886 2017 = 151 Jumlah seluruh rumah sd. Akhir Tahun 2017, sebanyak 71.970	2.83%	Dinas PMPTSP & KECAMATAN
			3 Keberadaan Perda RTRW	Ada/tidak ada perda	Perda Kota Dumai Nomor 27/2005 tentang perubahan perda nomor 11/2002 tentang RTRW Kota Dumai	ada	Bagian Hukum Setda
		Peraturan tentang Kependudukan	4 Pengurusan E-KTP	Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP	- Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = 178.494 - Jumlah Penduduk yang wajib ber E-KTP = 186.307	95,8%	Disdukcapil
			5 Biaya KTP	Biaya KTP dalam Perda	UU No. 24 Tahun 2013 ttg perubahan UU no. 23 Tahun 2006 ttg Administrasi kependudukan	Rp. 0,- (Tidak dipungut biaya)	Disdukcapil
		Personil Satpol PP (Kebijakan ketersediaan aparat Trantibum)	6 Rasio Persolin Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Personil pada Akhir Tahun 2017 / 10.000 penduduk x 100%	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017, sebanyak = 54 Org - Penduduk pada akhir Thn 2017 280,174	1.54	Satpol PP & DISDUK CAPIL
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS	7 Keberadaan Perda tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Perda Kota Dumai No.9 Tahun 2012 ttg Restribusi Pelayanan Sampah	ada	Bagian Hukum

1	2	3	4	5	6	7	8
		Peraturan tentang Kebersihan Kota	8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota	1 Perda Kota Dumai no 9 Tahun 2012 ttg Restribusi Pelayanan Sampah	ada	Bagian Hukum
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Penyampaian LPPD Tahun 2017 Tanggal Maret 2018	Tepat	Bagian Pemerintahan
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10 Ketepatan waktu penyampaian Lap keu dan Lakip berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Penyampaian Lap Keu 2017 tgl ..... 2018	Tidak Tepat	BPKAD	
		11 Ketepatan waktu penyampaian Lap keu dan Lakip berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Laporan Kinerja Tahun 2017, disampaikan pada Tanggal ..... 2018 sesuai surat pengantar Nomoir .... Tanggal ..... 2018	Tepat	Bappeda	
Implementasi SPM		12 Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan penetapan oleh menteri/pimpinan LPND	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 Urusan, yang terdiri dari: 1. Urusan Pendidikan, 2. Urusan Kesehatan, 3. Urusan PU dan Penataan Ruang, 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 5. Urusan Trantibum & Linmas, 6. Urusan Sosial	6 Urusan	Bagian Ortal	
Hubungan Antar Daerah		13 Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pertahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak .... MOU 1 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi riau dengan pemerintah kota Dumai Nomor : 15/PK/III/2011 dan Nomor : 7/DISHUB/2011 2 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemkab/Kota Se- Provinsi riau nomor : 40/KLH/2014 3 Nota Kesepahaman antara Sekjen Kementerian Kesehatan RI dengan Walikota Dumai Nomor : HK.05.01/II/1005/2016 dan 4/DINKES/2016	Ada 3 Jenis	Bagian Pemerintahan	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14 % Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> <sup>2</sup>	- Prioritas Pembangunan Daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional sebanyak : 5 program - Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 5 program	100.0%	Bappeda

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kewenangan	15 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaks daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2017 (APBD) = 21 Urusan	87.5%	Sekda/BPKAD/ Bappeda
		Keuangan	16 Waktu Penetapan Perda APBD Tahun 2017	Tepat atau tidak tepatnya waktu penetapan APBD Tahun 2017	Penetapan Perda Nomor 2 Thn 2017 Tentang APBD Kota Dumai TA 2017 Tanggal 13 Februari 2017	Tidak Tepat	BPKAD
			17 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak ada perda	Perda No.7 Thn 2009 Ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	ada	Bagian Hukum Setda
			18 Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk layanan dasar / Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017	67.5%	BPKAD
			- Pendidikan - Kesehatan - PU dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman - Trantibum & Linmas - Sosial  Total		Rp 389,037,853,203.00 Rp 278,967,303,587.85 Rp 158,225,339,193.94 Rp 12,239,238,379.00 Rp 18,264,551,840.00 Rp 7,303,476,856.00 <hr/> Rp 864,037,763,059.79		
			19 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan (termasuk yang dibiayai non APBD)	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan / Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2017 - Pendidikan Rp. 389.037.853.203 - Kesehatan Rp. 278.967.303.587,85 Total Rp. 668.005.156.790,85  Jumlah Total Belanja Rp 1,280,663,488,811.46	52.2%	BPKAD
		Pelayanan publik	20 Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada Perda	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Bagian Hukum

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kepegawaian	21 Ratio PNS Terhadap Penduduk	Jumlah PNS Kota / Jumlah Penduduk	Jumlah PNS Tahun 2017 Sebanyak 4094 orang Jumlah Penduduk Tahun 2017, 280,174	1.5%	BKPP Disudkcapil
			22 Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak ada nya data base kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)	Ada	BKPP
		Kelembagaan	23 Penataan SKPD	Jumlah Pembentukan SKPD Berdasarkan PP 18/2016	Jumlah SKPD Sebagai berikut : 1) Bagian (Setda) 12 Unit 2) Dinas 18 Unit 3) Badan 5 Unit 4) Inspektorat 1 Unit 5) Rumah Sakit 1 Unit 6) Satuan Polisi Pamong Praja 1 Unit 7) Kecamatan 7 Unit 8) Sekretariat 2 Unit	47 Unit	Bagian Organisasi Setda
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24 Perda yang ditetapkan	Jumlah Perda Yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda yang ditetapkan tahun 2017 sebanyak 16 Perda	16 Perda	Bagian Hukum
		Ranperda yang diajukan dalam tahun berjalan	25 Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi jumlah Ranperda yang diusulkan Tahun 2017	Ranperda yang diusulkan Tahun 2017 sebanyak 12  Ranperda yang disetujui DPRD Tahun 2017 sebanyak 16 Perda	75.0%	Bag. Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 x 100%	Jlh Keputusan yang ditindak lanjuti 32 kpts  Jlh Keputusan yang dihasilkan 32 kpts	100%	Setwan

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Walikota	27 Keputusan Walikota yang ditindak lanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keputusan Walikota dalam Tahun 2017 x 100%	Keputusan Walikota dalam Tahun 2017, sebanyak 764  Keputusan Walikota Tahun 2017 yg ditindak lanjuti sebanyak 764	100%	Bag Hukum
		Tindak lanjut Peraturan Walikota	28 Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti / jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2017 X 100%	Peraturan Walikota dalam Tahun 2017, sebanyak 56  Peraturan Walikota yang ditindak lanjuti sebanyak 56	100%	Bag Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	29 Jumlah perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan / Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	Ada/Tidak ada Perda yang dikirim ke Pemerintah untuk dievaluasi  1. Perda No.1 Tahun 2017 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak E-KTP dan Akta Catatan Sipil	ada	Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang konsultasi publik	30 Keberadaan perda /PerWalikota tentang konsultasi publik	Ada atau tidak Perda/PerWalikota	Ada atau tidak adanya Perda/PerWalikota dimaksud	Tidak Ada	Bag. Hukum
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, Bag/Biro Humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerWalikota	Jumlah Informasi yang ditetapkan oleh Peraturan walikota  Website (dumaikota.go.id)	Ada	Bag. Infokom
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap / jumlah dana perimbangan X 100%	Jumlah dana perimbangan yang terserap Rp. 755.592.886.590  Jumlah dana perimbangan tahun anggaran 2017 Rp. 855.435.909.105,13	88.3%	Badan Pendapatan
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	33 Belanja publik thd DAU	Jumlah belanja publik / DAU X 100%	Jumlah Realisasi belanja langsung Rp. 654.213.913.576,36  Jumlah DAU Rp. 408.643.780.000	160.09%	BPKAD & Bapenda
		Alokasi belanja pada APBD	34 Belanja langsung thd total APBD	Jumlah belanja langsung / APBD X 100%	Jumlah Realisasi Belanja langsung Rp. 654.213.913.576,36  Jumlah APBD Rp. 1.280.663.488.811,46	51.08%	BPKAD

1	2	3	4	5	6	7	8
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN	Besaran Pendapatan Asli	35 Besaran PAD terhadap sluruh	Jumlah PAD / jumlah total	Jumlah PAD Rp. 229.028.494.242,62		Bapenda

	EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI	Daerah (PAD)	pendapatan dalam APBD	pendapatan APBD X 100%	Realisasi Pendapatan APBD Rp. 1.148.755.169.864,23	19.9%	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Lapkeu	36 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017	Jenis Opini BPK terhadap hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2017	Opini Tahun 2016 WDP  Opini Tahun 2017 WDP	Inspektorat
		Besaran SILPA	37 Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA / jumlah pendapatan X 100%	Besaran SILPA Rp. 57.023.190.219,75  Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.148.755.169.864,23	5.0%	Dispenda & Bag. Keuangan
		Realisasi belanja	38 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja / total belanja APBD X 100%	Realisasi Belanja Rp. 1.129.589.124.874,36  Total Belanja APBD Rp. 1.280.663.488.811,46	88.2%	BPKAD
		Pengawasan Inspektorat Kota	39 Rasio Temuan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti/ temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2017	Jlh temuan yang ditindaklanjuti thn 2016 sebanyak 65 temuan dan temuan BPK RI sampai tahun 2016 18 temuan	27.69%	Inspektorat
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40 Rasio Realisasi PAD 2016 terhadap Potensi PAD	Jumlah Realisasi PAD Tahun 2017 / Potensi PAD X 100%	Realisasi PAD Rp. 229.028.494.242,62  Potensi PAD Rp. 187.542.626.000,93	122.12%	Bapenda
		Peningkatan PAD	41 Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD / PAD tahun lalu X 100% (PAD 2016-PAD 2015) : PAD 2015 X 100%	Kenaikan PAD Rp. 44.050.601.407,74  Jumlah PAD tahun lalu Rp. 184.977.892.834,88	23.81%	Dispenda

1	2	3	4	5	6	7	8
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM	Penghargaan	42 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh PEMDA dalam Tahun 2017	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam	Penghargaan yang diterima sebanyak 6 yang terdiri dari ;	Ada	Seluruh SKPD

	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemenang terbaik PKK - KB - KES Tingkat Nasional Kategori Kota</li> <li>2) Predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik</li> <li>3) Sertifikat Eliminasi Filariasis</li> <li>4) Patika Parahita</li> <li>5) Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2017 (Kategori Perawat)</li> <li>6) Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2017 (Ahli teknologi Lab. Medik)</li> <li>7) Juara 2 Temu Karya Penas XV 2017</li> <li>8) Baznas Award 2017</li> <li>9) Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Kategori MADYA</li> <li>10) Komitmen dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan KTP-el</li> <li>11) Komitmen dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran</li> </ul>		
		Pengadaan barang dan jasa	43 Keberadaan  E-procurement	Ada atau tidak ada		Ada	Bagian Pembangunan
		Daya saing daerah	44 Jumlah Persetujuan Investasi	Jumlah Izin Investasi dalam Tahun 2017	Persetujuan Ijin Investasi pada tahun 2017, sebanyak 29 Ijin (PMA)	29 Ijin	DPMPTSP





**BIDANG ADMINISTRASI UMUM  
PEMERINTAH KOTA DUMAI  
SKPD**

**URUSAN : URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	% CAPAIAN KINERJA																				RATA RATA			
						SETWAN	SETDA										BKPP	BPKAD	BAPEND A	INSPEKT ORAT	BAPPEDA	SATPOL PP	CAMAT						
							HUKUM	PEMERINTAHAN	PEMBANGUNAN	KESRA	KEUANGAN	HUMAS	UMUM	ORGANISASI	DTM	DBR							MKP	SEI. S	BKR		DK	DS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	% Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	(Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah program Nasional) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah d/td departemen / LPND	2	Keberadaan SOP	Ada atau tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN / UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut KM/Peraturan ttg SPM	3	% jumlah PERDA yang dilaksanakan oleh SKPD menurut Permen ttg SPM	(Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM - peraturan) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur jabatan	4	% struktur jabatan dan eselonering yang terisi	(Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) x 100%	100	100	100	100	100	100	75	100	100	91.67	95	100	100	100	100	100	100	100	100	88.24	100	100	97.72	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kota	1.1	0.2	0.3	0.22	0.32	0.32	0.27	0.78	0.27	0.6	1.2	2.15	1.07	0.64	1.37	1.1	1.1	1.2	1.3	1.44	1.32	1.29	0.89	
			7	% pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan / jumlah total pejabat SKPD yang ada ) x 100%	100	100	100	100	75	75	100	75	100	100	73.7	100	100	88	100	58.8	55	59	35.3	43.3	100	76.32	82.47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9						11		12	13		14	15	16	17	18	19			20		
			8	% pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkangan	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkangan / Jumlah total pejabat SKPD yang ada ) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak berikut jumlah-nya	3 Ada Ada	3.00																						
		Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	% Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	(Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD / jumlah program dalam RENJA SKPD ) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	% jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD	(jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD / jumlah program dalam RKA SKPD) x 100%	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.36
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	12	% jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	(Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD / jumlah program dalam DPA SKPD) x 100%	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.36
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	% anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	(alokasi anggaran SKPD / total APBD) x 100%	1.8	0.07	0.05	0.12	0.85	0.09	0.27	2.94	0.05	0.62	0.71	1.77	0.68	0.85	0.67	0.64	0.6	0.55	0.63	0.7	0.7	0.682	0.73	
		Besaran belanja modal	14	% belanja modal terhadap total belanja SKPD	(belanja modal / total belanja SKPD) x 100%	2.8	0	0	0	0	0	3.31	18	0	0	5.55	4.95	0.23	3.23	1.48	0.19	0.58	1.9	0.04	0.65	0	1.09	2.00	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	% Total Belanja pemeliharaan dr total belanja brg & jasa	total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	6.2	0	0	0	0.32	0	1.11	43	0	4.13	2	4.53	5.41	4.64	22.36	3.77	1.39	1.8	0.78	3.81	4.66	5.4	5.24	



TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PEMERINTAH : KOTA DUMAI

No	URUSAN	No	IKK	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	Ket
<b>URUSAN WAJIB</b>							
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ----- Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	$\frac{5,229}{15,380} \times 100\%$	34%	Dinas Pendidikan
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----- Jumlah penduduk usia 15th ke atas	$\frac{165,736}{166,526} \times 100\%$	99.53%	Dinas Pendidikan
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----- Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	$\frac{34,671}{32,302} \times 100\%$	107.33%	Dinas pendidikan
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----- Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	$\frac{12,936}{12,822} \times 100\%$	100.89%	Dinas Pendidikan
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD ----- Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD pd tahun ajaran sebelumnya	$\frac{5}{39,087} \times 100\%$	0.01%	Dinas pendidikan
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP ----- Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP pd tahun ajaran sebelumnya	$\frac{4}{15,692} \times 100\%$	0.03%	Dinas Pendidikan
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	$\frac{5,983}{5,983} \times 100\%$	100.00%	Dinas Pendidikan
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	$\frac{4,899}{4,899} \times 100\%$	100.00%	Dinas pendidikan
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ----- Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	$\frac{5,606}{5,788} \times 100\%$	96.86%	Dinas pendidikan
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berjasah kualifikasi S1/D-IV ----- Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs	$\frac{2,840}{3,297} \times 100\%$	86.14%	Dinas pendidikan

1	2	3	4	5	6	8	
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu  $\frac{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah Pada kurun waktu yg sama}}{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	$\frac{1,483}{1,702} \times 100\%$	87.13%	Dinas Kesehatan
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu  $\frac{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	$\frac{7,575}{8,126} \times 100\%$	93.22%	Dinas Kesehatan
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI ----- Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan  $\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100\%$	$\frac{33}{33} \times 100\%$	100%	Dinas Kesehatan
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu  $\frac{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\%$	100%	Dinas Kesehatan
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah_penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn  $\frac{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	$\frac{400}{1,375} \times 100\%$	29.09%	Dinas Kesehatan
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah_penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn  $\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	$\frac{92}{92} \times 100\%$	100%	Dinas Kesehatan
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1  $\frac{\text{Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota}} \times 100\%$	$\frac{36,065}{66,113} \times 100\%$	54.55%	Dinas Kesehatan
		18	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu  $\frac{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun wkt yang sama}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	$\frac{7,339}{7,738} \times 100\%$	94.84%	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	8
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3) ----- x 100% Volume produksi sampah (m3)	$\frac{56,940}{81,760} \times 100\%$	69.64%	DLH
		20	Kebersihan Jlh Pasar Tradisonal tergolong baik ----- x 100% Jumlah seluruh Pasar Tradisonal	$\frac{3}{15} \times 100\%$	20.0%	Dinas Perdagangan
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) ----- x 1000 Jumlah penduduk	$\frac{112,00}{280,174} \times 1000$	0.40	DH
		22	Penegakan hukum lingkungan Jumlah Kasus lingk.yang diselesaikan Pemda ----- x 100% Jumlah Kasus Lingkungan yang ada	$\frac{6}{6} \times 100\%$	100%	DLH
4	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	23	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan Kota dalam kondisi baik ----- x 100% Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut	$\frac{845,73}{1,486,70} \times 100\%$	56.89%	Dinas PU
		24	Rumah Tangga Ber Sanitasi Jumlah rumah tangga ber sanitasi ----- x 100% Jumla total rumah tangga	$\frac{53,123}{71,970} \times 100\%$	74%	Dinas Kesehatan
		25	Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh ----- x 100% Luas Wilayah	$\frac{127,60}{1,727,38} \times 100\%$	7.4%	Dinas Perkim
		26	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Luas ruang terbuka hijau ----- x 100% Luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{4,824,91}{119,511} \times 100\%$	4.037%	DLH
7	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	27	Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ----- x 100% Jumlah seluruh rumah tangga	$\frac{27,658}{71,190} \times 100\%$	38.9%	Dinas PU
		28	Lingkungan Permukiman Kumuh Luas Lingkungan Permukiman Kumuh ----- x 100% Luas Wilayah	$\frac{128,32}{1,727,38} \times 100\%$	7.4%	Dinas Perkim
		29	Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni ----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	$\frac{68,191}{71,970} \times 100\%$	94.75%	Dinas Perkim

1	2	3	4	5	6	8
6	Kepemudaan dan Olahraga	30	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) ----- Jumlah gelanggang/balai remaja ----- x 1,000	$\frac{1}{280,174} \times 1,000$	0.004	Dinas Kopar
		31	Lapangan olahraga ----- Jumlah lapangan olahraga di Kota ----- Jumlah penduduk Lapangan olahraga adalah : 1. lap sepak bola 1 2. lap basket 17 3. lap volly 67 4. lap Takraw 20 5. Lap Badminton 43 6, Lap Futsal 22 jumlah 170	$\frac{170}{280,174} \times 1,000$	0.607	Dinas Kopar
7	Penanaman Modal	32	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) ----- Realisasi PMDN thn 2017 – Realisasi PMDN 2016 ----- x 100% ----- Realisasi PMDN 2016	$\frac{(311,777,800,000)}{2,318,981,600,000} \times 100\%$	-13.44%	Dinas PM & PTSP
8	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif ----- Jumlah Koperasi aktif ----- Jumlah seluruh koperasi ----- x 100%	$\frac{161}{199} \times 100\%$	80.90%	Dinas Industri, Koperasi
		34	Usaha Mikro dan Kecil ----- Jumlah usaha mikro dan kecil ----- Jumlah seluruh UKM ----- x 100%	$\frac{9,821}{12,672} \times 100\%$	77.50%	Dinas Industri, Koperasi
9	Administrasi Kependudukan & Capil	35	Kepemilikan KTP ----- Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----- Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) ----- x 100%	$\frac{178,494}{186,307} \times 100\%$	95.81%	Disdukcapil
		36	kepemilikan akta kelahiran ----- Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran ----- Jumah Penduduk ----- x 100%	$\frac{90,362}{280,174} \times 100\%$	%	Disdukcapil
		37	penerapan KTP Nasional berbasis NIK ----- Sudah/belum	Perda No 6 Thn 2007 Tentang Pencatatan Kependudukan	Sudah	Disdukcapil
10	Ketenagakerjaan	38	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh ----- Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Aktif ----- Jumlah Pekerja/Buruh ----- x 100%	$\frac{33,648}{15,055} \times 100\%$	223.50%	Disnakertrans

1	2	3	4	5	6	8
		39	Pencari kerja yang ditempatkan ----- Jumlah pencari kerja yang mendaftar x 100%	$\frac{1,210}{5,646} \times 100\%$	21.43%	Disnakertrans
11	Ketahanan Pangan	40	Regulasi ketahanan pangan Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perbup dsb.	-	tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan
		41	Ketersediaan bahan pangan Utama Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun ----- Jumlah penduduk x 1000	$\frac{32,146}{280,174} \times 1000$	115	Dinas Ketahanan Pangan
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42	partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ----- Jumlah pekerja perempuan x 100%	$\frac{5,202}{10,442} \times 100\%$	49.82%	Dinas PP & PA
		43	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf ----- Jumlah_anak perempuan usia > 15 tahun x 100%	$\frac{8,746}{8,969} \times 100\%$	97.51%	Dinas PP & PA
		44	Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ----- Jumlah angkatan kerja perempuan x 100%	$\frac{10,442}{19,039} \times 100\%$	54.85%	Dinas PP & PA
13	Pengendalian Penduduk & KB	45	Prevalensi peserta KB aktif Jumlah peserta program KB aktif ----- Jumlah pasangan usia subur x 100%	$\frac{33,059}{47,387} \times 100\%$	69.76%	Dinas PP & KB
		46	Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan ----- PLKB/PKB x 100%	$\frac{33}{16} \times 100\%$	206.25%	Dinas PP & KB
14	Perhubungan	47	Angkutan darat Jumlah angkutan darat ----- Jumlah penumpang angkutan darat x 100%	$\frac{11,564}{120,401} \times 100\%$	9.60%	Dishub
15	Komunikasi dan Informatika	48	Web site milik pemerintah daerah Ada/ tidak ada	dumaikota.go.id	Ada	Bagian Kominfo
		49	Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	2 Kali	Ada	Dinas PM & PTSP
16	Pertanahan	50	Luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ----- Luas lahan yg seharusnya bersertifikasi di suatu daerah x 100%	$\frac{2,195,973}{12,338,236} \times 100\%$	17.80%	Bag. Pertanahan
		51	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah kasus yang diselesaikan ----- Jumlah kasus yang terdaftar x 100%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Bag. Pertanahan

1	2	3	4	5	6	8	
		52	Penyelesaian Izin Lokasi ----- Permohonan Ijin Lokasi	Jumlah Ijin Lokasi ----- x 100%	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100%	DPMPTSP
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	53	PKK aktif ----- Jumlah PKK	Jumlah PKK aktif ----- x 100%	$\frac{41}{41} \times 100\%$	100%	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
		54	Posyandu ----- Total Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif ----- x 100%	$\frac{196}{196} \times 100\%$	100%	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
18	Sosial	55	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang harus terdapat di suatu daerah	13	Bh	Dinas Sosial
		56	persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak profesional yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun ----- x 100%	$\frac{48}{595} \times 100\%$	8.07%	Dinas Sosial
		57	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	$\frac{12,409}{16,349} \times 100\%$	75.90%	Dinas Sosial
19	Budaya	58	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	17 Festival	17 Kali	Disdik Budaya
		59	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 Sarana	Ada 1 Sarana	Disdik Budaya
		60	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ----- Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	$\frac{25}{25} \times 100\%$	100%	Disdik Budaya
20	Statistik	61	Buku " Dumai dalam angka"	Ada atau tidak ada	Ada	Ada	Bappeda
		62	Buku "PDRB Dumai"	Ada atau tidak ada	Ada	Ada	Bappeda

1	2	3	4	5	6	8
21	Kearsipan	63	Penerapan pengelolaan arsip secara baku Jmlh SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD	$\frac{33}{47} \times 100\%$	70.21%	Dinas Pustaka & Arsip
		64	Kegiatan peningkatan SDM pengelola pengarsipan Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola pengarsipan	2 Kali	Ada	Dinas Pustaka & Arsip
22	Perpustakaan	65	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{11,517}{42,309} \times 100\%$	27.22%	Dinas Pustaka & Arsip
		66	Pengunjung perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	$\frac{28,194}{257,777} \times 100\%$	10.94%	Dinas Pustaka & Arsip
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (Ton) ----- Target Daerah (Ton)	$\frac{1,273.16}{493.29} \times 100\%$	258.10%	Dinas Perikanan
		2	Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) ----- Target Daerah (Kg)	$\frac{32}{31} \times 100\%$	103.23%	Dinas Perikanan
2	Pertanian	3	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produksi tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) Luas areal tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	$\frac{6,715.60}{1,954}$	3.44	Dinas Ketahanan Pangan
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016** Jlh Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- Jumlah total PDRB (Dalam Jutaan Rupiah)	$\frac{1,687,641.4}{27,945,396.0} \times 100\%$	6.04%	Dinas Ketahanan Pangan
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	45,340	45,340	Dinas Kopar
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016** Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata ----- Jumlah total PDRB	$\frac{1,590,920.5}{27,945,396.0} \times 100\%$	5.69%	Dinas Kopar
4	Industri	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2016** Jlh Kontribusi PDRB dr sektor industri ----- Jumlah total PDRB	$\frac{15,058,108.1}{27,945,396.00} \times 100\%$	53.88%	Dinas Industri & Koperasi, UKM
		8	Pertumbuhan Industri Jml Industri Ta. 2017 - Jlh Industri Ta. 2016 ----- Jumlah Industri s/d tahun 2016	$\frac{91}{847} \times 100\%$	10.74%	Dinas Industri & Koperasi, UKM

1	2	3	4	5	6	8
---	---	---	---	---	---	---

5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016**)	Jlh Kontribusi PDRB dr sektor perdagangan (Rp) ----- Jumlah total PDRB	$\frac{5,000,294.7}{27,945,396} \times 100\%$	17.89%	Dinas Perdagangan
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor 8.915.534.937,68 - 0		8,915,534,937.68	8,915,534,937.68
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa ----- Jumlah transmigran	$\frac{0}{250} \times 100\%$	0%	Disnaker Trans

**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada/Tidak	Ada	Bappeda
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak ada	Ada Perda No 8 Tahun 2016 ttg RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	Ada	Bappeda
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak ada	Ada Perwa No. 26 Tahun 2017	Ada	Bappeda
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----- Jumlah program RPJMD yg hrs dilaks. Tahun	$\frac{186}{208} \times 100\%$	89.42%	Bappeda
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai	Ada/Tidak	Ada 3	Bagian Kominfo
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Dokumen Hasil Survey IKM	Ada	Dinas PM & PTSP

**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

		1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Kegiatan	1 Kali	Kesbangpol
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4 Kegiatan	4 Kali	Kesbangpol

Keterangan

\*) Pilih Salah Satu

\*\*\*) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2015